



SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM POIN PELANGGARAN DALAM
MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA DI SMA NEGERI 5
TANA TORAJA**

ADITYA KRISTIAN

1743041009

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2022



**PENERAPAN SISTEM POIN PELANGGARAN DALAM
MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA DI SMA NEGERI 5
TANA TORAJA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada Jurusan Administrasi Pendidikan Strata Satu (S1)
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar

ADITYA KRISTIAN

1743041009

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Alamat: JL. Tamalate I Kampus Tidung UNM
Telepon: (0411)884457-883076 fax (0411)883076
Laman : <http://www.unm.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa SMA Negeri 5 Di Kabupaten Tana Toraja”**

Nama : Aditya Kristian
NIM : 1743041009
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti, naskah skripsi penelitian ini telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Makassar, 16 April 2021

Pembimbing I;

Pembimbing II;

Dr. Andi Nurochmah, M.Pd
NIP. 19580518 198503 2 001

Andi Wahed, S.Pd, M.Pd
NIP. 19870310 201504 1 003

Disahkan:

Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan



Dr. Ed. Faridah, S.T. M.Sc
NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222
Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457
Laman: <http://fip.unm.ac.id>; E-mail: fip@unm.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Aditya Kristian
NIM : 1743041009
Judul : Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja

Nomor SK : 01317/UN36.4//PP/2022


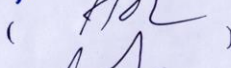
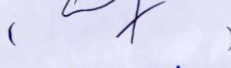
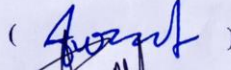


Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Senin 14 Februari 2022 dan dinyatakan dapat diterima sebagai bagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 pada Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.

Dibahkan oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Makassar

Abdul Saman, M.Si., Kons
NIP.19720817 200212 1 001

Panitia Ujian

Ketua Penguji : Dr. Mustafa, M.Si
Sekretaris Penguji : Dra. Sitti Habibah, M.Si
Pembimbing I : Dr. Andi Nurochmah, M.Pd
Pembimbing II : Andi Wahed, S.Pd., M.Pd
Penguji I : Dr. Muhammad Ardiansyah, S.IP., M.Pd
Penguji II : Syamsurijal Basri, S.Pd., M.Pd

()
()
()
()
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Kristian

NIM : 1743041009

Jurusan : Administrasi Pendidikan (S1)

Judul : Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan
Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan atau mengandung unsur plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makassar, 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Aditya Kristian
NIM. 1743041009

MOTTO DAN PERUNTUKAN

“Di tengah kesulitan terdapat kesempatan”

(Albert Einstein)

Kuperuntukkan skripsi ini

Untuk kedua Orang Tuaku tercinta, terima kasih untuk titipan harapan yang besar, kesabaran yang luar biasa dan pengorbanan yang diberikan selama ini serta perhatian dan doa yang diberikan.

ABSTRAK

Aditya Kristian, 2021. Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di SMA Negeri 5 Tana Toraja. Skripsi. Dibimbing oleh Dr. Andi Nurochmah, M.Pd dan Andi Wahed, S.Pd, M.Pd; Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran penerapan sistem poin dan dampaknya terhadap tingkat kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang diterapkannya sistem poin yaitu untuk menegakkan disiplin siswa dan mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan siswa. Pihak pelaksana dalam sistem poin adalah semua komponen sekolah yang sudah memiliki peran dan tugas masing-masing. Dalam tata aturan sistem poin setiap pelanggaran mempunyai bobot poin masing-masing, penghargaan (reward) berupa penghapusan poin diberikan kepada siswa yang berprestasi dan siswa yang akumulasi poin pelanggaran sudah cukup 100 akan dikeluarkan dari sekolah. Prosedur penanganan terhadap siswa yang akumulasi poinnya tinggi dilakukan sebanyak tiga kali, pembinaan pertama 30 poin, pembinaan kedua 50, dan pembinaan ketiga 75 poin, pembinaan siswa melibatkan wali kelas, wakasek bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling dan orang tua siswa. Faktor penghambat pelaksanaan sistem poin yaitu sebagian guru tidak menjalankan sistem poin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sedangkan faktor pendukungnya yaitu adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah dalam mengawasi pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Penerapan sistem poin di sekolah sudah cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, dimana sebagian besar siswa sudah menaati aturan tata tertib yang berlaku di sekolah.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. atas berkat rahmat dan tuntunan-Nya skripsi berjudul “Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Di SMA Negeri 5 Tana Toraja” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar.

Penulis menyadari bahwa sejak penyusunan proposal sampai skripsi ini selesai, banyak hambatan, rintangan dan halangan, namun berkat bantuan, motivasi dan doa dari berbagai pihak semua ini dapat teratasi dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Muhammad Ali dan Ibunda Yuldiana Rantetasik serta Ayahanda Piter Kabanga dan Ibunda Maria Turu’allo, Orang tua terbaik yang selalu saya banggakan yang telah menuntunku dalam menjalani kerasnya kehidupan dan mengajarkan arti kehidupan dengan cinta dan kasih sayang yang murni serta kesabaran dan ketulusan do’anya yang selalu mengiringi langkahku. Serta kepada saudara-saudaraku, atas segala dukungan dan do’anya selama penulis menempuh pendidikan.

Secara khusus, penulis menghaturkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Andi Nurochmah, M.Pd, selaku pembimbing satu dan Bapak Andi Wahed, S.Pd.,M.Pd., selaku pembimbing dua yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan, dorongan, serta semangat kepada penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya tak lupa penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Negeri Makassar.
2. Dr. Abdul Saman, M.Si., Kons, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.
3. Dr. Ed. Faridah, ST., M.Sc selaku Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Universitas Negeri Makassar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
5. Jamaluddin, S.Pd selaku operator Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar yang senantiasa membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir yang berhubungan dengan administrasi akademik tingkat jurusan.

6. Drs. Marthen Leme Piri, M.Pd selaku kepala UPT SMA Negeri 5 Tana Toraja serta jajaran para guru yang telah memberikan izin, memfasilitasi, dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Mahasiswa Administrasi Pendidikan angkatan 2017, khususnya teman-teman AP kelas 01 sudah menjadi teman yang baik serta selalu membantu dalam segala hal, terima kasih atas kebersamaannya selama ini dalam melewati masa perkuliahan dikala suka maupun duka. Semoga sukses kedepannya.
8. Kepada teman-teman KKN domisili Kabupaten Tana Toraja terima kasih atas kebersamaannya selama tiga bulan yang sangat berkesan.
9. Seluruh pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu. Hal ini tidak mengurangi rasa terima kasihku atas segala bantuannya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa tak ada manusia yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran yang konstruktif sehingga penulis dapat berkarya yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun dunia pendidikan secara umum.

Makassar, 20 Januari 2022

Penulis,


Aditya Kristian

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO DAN PERUNTUKAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	11
A. Tinjauan Pustaka	11
1. Tata Tertib Sekolah	11
2. Sistem Poin Pelanggaran	16
3. Kedisiplinan.....	23
B. Kerangka Konseptual	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	35
B. Kehadiran Peneliti.....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Deskripsi Fokus.....	37
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Analisis Data	40
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	43

I. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. HASIL PENELITIAN.....	48
1. Gambaran Umum SMA Negeri 5 Tana Toraja	48
2. Deskripsi Hasil Penelitian	50
B. PEMBAHASAN	76
1. Gambaran Penerapan Sistem Poin.....	76
2. Dampak Penerapan Sistem Poin Pelanggaran	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. KESIMPULAN	84
B. SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90
RIWAYAT HIDUP.....	153

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
4. 1	Pelaksana sistem poin pelanggaran.....	54
4. 2	Daftar pembinaan siswa sehubungan poin pelanggaran	64

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Kerangka konseptual.....	34

DAFTAR LAMPIRAN

No	Nama Lampiran	Halaman
1.	Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	91
2.	Draft pedoman wawancara.....	93
3.	Matriks Analisis Data.....	100
4.	Dokumentasi	139
5.	Persuratan.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan pada hakekatnya adalah sebagai usaha menyiapkan anak didik untuk menghadapi lingkungan hidup yang senantiasa mengalami perubahan dan pendidikan itu pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi serta masyarakat. Dalam hal ini sekolah merupakan lingkungan dimana siswa dapat mengikuti serangkaian kegiatan yang bersifat mendidik, sehingga sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik siswa-siswinya agar memiliki jiwa disiplin dalam dirinya.

Pendidikan sekolah diselenggarakan untuk memberi bekal dasar untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan tanggung jawab. Hal ini dapat dipahami dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 Amandemen kedua yang berbunyi bahwa: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan Nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur undang-undang”.

Dari landasan diatas maka dari tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menjelaskan bahawa tujuan pendidikan Nasional adalah: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemajuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokratis serta bertanggung jawab.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kebijakan tertentu yang dituangkan dalam bentuk aturan. Bentuk aturan sekolah itu disebut dengan tata tertib sekolah. Dalam tata tertib sekolah, siswa dituntut untuk menaati tata tertib sekolah dalam menuju keberhasilan proses belajar mengajar, dan membentuk karakteristik siswa agar disiplin dan bertanggung jawab. Pentingnya peraturan sekolah tersebut dibuat untuk mendidik rasa disiplin yang berperan mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, mengubah, membina, dan membentuk perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan. Penanaman nilai disiplin dan tanggung jawab pada diri siswa di sekolah akan mereka bawa di lingkungan sekitar, baik itu dalam keluarga maupun lingkungan sosial masyarakat secara luas. Menurut Hasibuan (2002) disiplin ialah suatu sikap menghormati dan menghargai suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak menolak untuk menerima sanksi-sanksi apabila dia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya.

Pengendalian sikap dan perilaku siswa sebagai pelajar di sekolah sangat dibutuhkan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam kehidupan. Lemahnya pengendalian diri pada individu/siswa akan berdampak pada terbentuknya perilaku menyimpang, yang disebut sebagai masalah disiplin yang menggejala dalam bentuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah, seperti: perilaku membolos, terlambat masuk sekolah, ribut di kelas, ngobrol di kelas saat guru

sedang menjelaskan mata pelajaran, tidak mengenakan atribut sekolah secara lengkap, menyontek (Widodo, 2009). Perilaku siswa yang demikian menunjukkan siswa yang kurang disiplin dan tanggung jawab sebagai seorang pelajar yang terdidik.

Sistem poin merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan dalam tata tertib yang diambil sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin pelanggaran adalah pemberian sanksi atau hukuman atas setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa dengan memberikan sejumlah poin tertentu sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa (Firdaus, 2015). Sistem poin ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan sanksi yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan sistem poin mempunyai kelebihan diantaranya menghindari adanya sanksi atau hukuman dengan fisik yang marak terjadi di sekolah-sekolah (Wijayanti, 2013). Hukuman fisik tidak selamanya efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan, hukuman yang dimaksudkan untuk membuat anak menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya tidak jarang menurunkan kepercayaan diri anak dan menimbulkan dendam yang mendalam.

Kedisiplinan merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Untuk menciptakan sekolah yang berkualitas diperlukan iklim sekolah yang kondusif. Salah satu iklim yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses pendidikan berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan semua pihak adalah dengan tegaknya disiplin sekolah. Disiplin sekolah yang

berwibawa dan ditaati oleh semua komponen pendidikan terutama oleh siswa, merupakan kunci untuk membentuk sekolah yang berkualitas. Sikap disiplin tidak terbentuk secara instan, dibutuhkan proses panjang agar disiplin menjadi kebiasaan yang melekat kuat dalam diri seorang anak.

Alasan yang menjadi dasar pentingnya disiplin yaitu menurut Tu'u (2004) ada empat alasan pentingnya disiplin dalam kegiatan di sekolah, keempat alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut: (1) dengan disiplin yang muncul karena kesadaran diri, maka siswa akan berhasil dalam belajarnya, sebaliknya siswa yang seringkali melanggar ketentuan sekolah pada umumnya terhambat oleh optimalisasi potensi dan prestasinya; (2) tanpa disiplin yang baik, suasana sekolah menjadi kurang kondusif bagi kegiatan pembelajaran; (3) orang tua selalu berharap di sekolah anak-anak dibiasakan dengan norma-norma dan nilai kehidupan sehingga menjadi individu yang tertib, teratur, dan disiplin; (4) disiplin merupakan jalan bagi siswa untuk sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja.

Dengan disiplin dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, siswa akan belajar mempunyai tanggung jawab terhadap aturan yang ada. Suatu peraturan yang dilaksanakan dengan baik akan membuat seseorang hidup disiplin. Dengan demikian, pelaksanaan program sekolah dalam pencapaian visi dan misinya untuk mewujudkan mutu pendidikan yang mempunyai kompetensi sesuai Standar Nasional Pendidikan akan bisa tercapai apabila didukung dengan kualitas proses pembelajaran yang baik dan semua komponen sekolah yang mempunyai komitmen terhadap kedisiplinan. Disiplin di sekolah merupakan usaha untuk memperkenalkan cara atau memberikan pengalaman yang baik. Jika setiap individu mempunyai

kedisiplinan, maka tata tertib sekolah akan tercermin dan disiplin akan terlihat meskipun tanpa disertai hukuman, anak sudah dapat bertingkah-laku dan mamilih perbuatan-perbuatan yang diharapkan darinya (Soegeng, 1994).

Berkaitan dengan hal di atas, pihak sekolah harus mampu menegakkan tata tertib sekolah dalam membangun jiwa disiplin dan tanggung jawab siswa. Sekolah dan guru pada khususnya harus menyadari bahwa siswa memiliki latar belakang dan karakteristik yang berbeda. Melalui penerapan sistem poin pelanggaran diharapkan siswa dapat menemukan jati diri dan mengembangkan dirinya secara optimal, yaitu agar dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Titik berat penerapan sistem poin pelanggaran bertujuan untuk mengurangi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa dan menegakkan disiplin sekolah. Sistem poin mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan kartu kuning (peringatan) yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Setiap poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa dikumpulkan sampai batas waktu tertentu. Jika poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa telah mencapai batas maksimal, maka kartu kuning tadi dapat berubah menjadi kartu merah sebagai isyarat bahwa siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah (diberhentikan).

Di Kabupaten Tana Toraja terdapat salah satu sekolah unggulan yakni, SMA Negeri 5 Tana Toraja, yang berada di Jl. Nusantara No. 69A. Kelurahan bombongan, Kecamatan Makale merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan sistem poin pelanggaran dengan akreditasi A. Berdasarkan hasil

wawancara awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 26 Januari 2021 kepada guru Bimbingan dan Konseling (Ibu Yrp) di SMA Negeri 5 Tana Toraja mengatakan bahwa:

“Sekolah telah menerapkan sistem poin pelanggaran dalam tata tertib sekolah sejak tahun ajaran 2007/2008 dan mulai efektif pada tahun ajaran 2008/2009. Sebelum sistem poin diterapkan tingkat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa sangat tinggi contohnya, bolos, alpa, terlambat, merokok di sekolah, berkelahi, dan sering terlibat tawuran antar pelajar, hal inilah yang melatar belakangi sehingga pihak sekolah berkeinginan untuk memberikan sanksi/hukuman yang membuat siswa jera dalam melakukan tanpa membedakan latar belakang dan status sosial dari siswa. Setelah diterapkannya sistem poin tingkat pelanggaran siswa mulai berangsur menurun ditandai dengan sudah tidak ada lagi siswa SMA 5 yang kedapatan terlibat tawuran, tidak ditemukannya lagi siswa yang merokok di sekolah, dan siswa mulai datang tepat waktu ke sekolah. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada saja sebagian kecil siswa yang sering melanggar tata tertib”.

Berdasarkan pernyataan informan ibu Yrp di atas bahwa sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja mulai efektif sejak tahun ajaran 2008/2009 sampai sebelum pandemi covid-19. Sebelum diterapkannya sistem poin pelanggaran, tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa masih sangat tinggi seperti bolos dan merokok di lingkungan sekolah, setelah diterapkannya sistem poin pelanggaran, tingkat pelanggaran siswa mulai berangsur menurun

Dalam penelitian ini, hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan konteks penelitian yang akan dikaji yaitu: Pertama, Rodhiyah et al (2018) meneliti tentang implementasi kebijakan sekolah tentang poin pelanggaran tata tertib siswa dalam membentuk perilaku siswa yang berkarakter di SMA Negeri 7 Kediri. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Kebijakan sekolah mengenai poin pelanggaran berdampak baik pada penurunan tingkat pelanggaran siswa,

perilaku siswa sudah mulai menunjukkan adanya perilaku berkarakter diantaranya, berdisiplin, menghormati norma-norma hukum yang berlaku, bertanggung jawab dan kondisi sekolah yang semakin kondusif, serta terjalin hubungan kekerabatan antar peserta didik maupun antar guru dengan peserta didik. Faktor-faktor yang mendukung kebijakan ini adalah adanya komunikasi tindak lanjut yang baik antara pihak tatib dan pihak wali kelas, menjadikan siswa selalu terawasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih kurangnya kesadaran siswa akan ketertiban dan administrasi yang kurang memadai.

Kedua Susanto (2015) meneliti tentang manajemen sistem poin dalam membina kedisiplinan siswa di SMA Negeri 4 Lubuklinggau. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: manajemen sistem poin dalam membina kedisiplinan siswa telah tergambar melalui proses dan tahapan seperti adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta adanya faktor pendukung dan penghambat dalam manajemen sistem poin. Tujuan implementasi sistem poin di SMA Negeri 4 Lubuklinggau adalah untuk membuat siswa menjadi lebih rajin dalam aktivitas sekolah dan juga agar siswa lebih menaati aturan dalam setiap aktivitas di lingkungan sekolah.

Ketiga, Purwantoro (2008), meneliti tentang upaya pihak sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik MTsN Ngeplak Sleman Yogyakarta. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Upaya yang dilakukan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa meliputi pemberlakuan kode etik siswa, penanaman kesadaran disiplin, pemberian angket kesepakatan kesediaan mematuhi aturan sekolah kepada wali murid sebagai wujud kerjasama orang tua

siswa dengan sekolah, dan pemberian motivasi kepada siswa agar selalu bersikap disiplin. Faktor pendukung upaya peningkatan kedisiplinan siswa yaitu adanya kerjasama yang baik antar madrasah dan orang tua siswa, adanya ketegasan dalam menjalankan tata tertib sekolah, dan adanya peran serta BK yang sangat membantu siswa untuk mengembangkan pola perilaku yang baik dalam dirinya. Sedangkan faktor penghambat yaitu adanya sebagian siswa yang kurang memahami arti tata tertib sekolah.

Secara umum dari hasil penelitian yang dipaparkan di atas membahas mengenai upaya pihak sekolah dalam mengelola pendidikan ke arah peningkatan kedisiplinan siswa sehingga nilai-nilai kedisiplinan dapat di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan penerapan sistem poin dalam hal latar belakang penerapan, pihak pelaksana, tata aturan, prosedur penanganan pelanggaran, serta dampaknya dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Rasa keingintahuan peneliti tersebut dituangkan melalui penelitian ilmiah yang berjudul penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti merumuskan fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja ?

2. Bagaimanakah dampak penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa program studi administrasi pendidikan dalam aplikasi teori dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen peserta didik yang telah dipelajari.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang peningkatan kedisiplinan dalam penerapan sistem poin pelanggaran.

a. Bagi Guru Bimbingan Konseling

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalisme kerja dan meningkatkan pola-pola bimbingan yang tepat sehingga tercapai tujuan dalam membentuk siswa yang berjiwa disiplin.

b. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi bagi siswa untuk lebih meningkatkan pemahaman kedisiplinan dalam mentaati tata tertib.

c. Bagi Penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan dalam perumusan desain penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya yang berkenaan dengan penelitian mengenai budaya disiplin siswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Tinjauan Pustaka

1. Tata Tertib Sekolah

a. Pengertian Tata Tertib Sekolah

Tata tertib adalah patokan seseorang untuk bertingkah laku sesuai yang diharapkan oleh keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam Permendiknas RI No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah, bagian B nomor 9 mengatur pedoman pelaksanaan tata tertib dalam poin c sebagai berikut:

“sekolah/madrasah menetapkan pedoman tata tertib yang berisi: 1) tata tertib pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; 2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di sekolah/madrasah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib”

Menurut Langgulun (1986) bahwa tata tertib adalah adanya susunan dan aturan dalam hubungan suatu bagian dengan bagian yang lain. Selanjutnya Indrakusuma (1973) mengartikan tata tertib sebagai sederetan peraturan yang harus ditaati dalam suatu situasi atau dalam tata kehidupan tertentu. Mendikbud (1986) menyatakan bahwa tata tertib sekolah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Dalam KBBI (2007) tata tertib berasal dari dua kata yaitu “tata dan tertib” tata adalah aturan (biasanya dipakai di kata majemuk) dapat diartikan kaidah, aturan, dan susunan, cara menyusun sistem, sedangkan tertib adalah teratur menurut aturan

rapi. Jadi tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus di taati atau dilaksanakan.

Remaja-remaja yang sedang dalam masa transisi, sangat rentan sekali terhadap perilaku yang menyimpang. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum atau aturan yang harus diterapkan di sekolah yang bertujuan untuk membatasi setiap perilaku siswa. Di lingkungan sekolah yang menjadi hukumnya adalah tata tertib sekolah (Suradi, 2017). Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat di lingkungan sekolah. Menurut Suharsimi (2012) pada hakikatnya tata tertib sekolah baik yang berlaku secara umum maupun khusus meliputi tiga unsur yaitu:

- 1) Perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan dan dilarang.
- 2) Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pelanggar peraturan.
- 3) Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan atau subjek yang dikenai tata tertib sekolah tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata tertib sekolah merupakan hal yang penting bagi para siswa. Dimana hal tersebut dapat mendidik serta membina perilaku siswa di sekolah, karena tata tertib sekolah berisi aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh para siswa. Selain itu, tata tertib sekolah juga bertindak sebagai pengendalian perilaku siswa, karena tata tertib sekolah berisi larangan-larangan bagi siswa tentang suatu perbuatan. Selain itu tata tertib sekolah juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya.

b. Fungsi Tata Tertib Sekolah

Menurut Hurlock (1990) bahwa tata tertib sekolah mempunyai dua fungsi yang penting dalam membantu membiasakan anak mengendalikan dan mengekang perilaku yang diinginkan yaitu: (1) peraturan mempunyai nilai pendidikan, sebab peraturan memperkenalkan pada anak perilaku yang disetujui dan perilaku yang tidak disetujui oleh anggota kelompok; (2) peraturan membantu mengekang perilaku yang tidak diinginkan. Agar tata tertib dapat memenuhi kedua fungsi di atas maka tata tertib itu harus dimengerti, diingat, dan diterima oleh individu atau siswa, bila tata tertib diberikan dalam kata-kata yang tidak dapat dimengerti, maka tata tertib tidak berharga sebagai suatu pedoman perilaku. Adapun tiga fungsi tata tertib sekolah bagi siswa dalam Gurupkn (2015) yaitu:

1) Sebagai alat untuk mengatur perilaku dan sikap siswa selama di sekolah

Keberadaan tata tertib sekolah akan mampu menjamin kehidupan yang tertib dan tenang di sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Dengan pelaksanaan tata tertib sekolah yang tepat, jelas, konsekuen, dan diawasi dengan sungguh-sungguh akan menciptakan suasana belajar di sekolah yang tertib, damai, dan tentram. Tata tertib sekolah yang ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh para siswa dapat menjadi suatu pembelajaran bagi mereka untuk dapat menghormati aturan-aturan umum lainnya serta mereka dapat belajar mengembangkan sikap mengendalikan diri.

2) Sebagai Sarana Pendidikan

Dengan keberadaan tata tertib sekolah maka akan memperkenalkan siswa pada perilaku yang disetujui oleh suatu lingkungan. Dengan begitu pada

akhirnya siswa dapat membawa dirinya kedalam kehidupan yang lebih luas yaitu lingkungan masyarakat, dimana sebelum terjun kedalam kehidupan masyarakat para siswa telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat mengekang atau mengendalikan diri, sehingga nantinya mereka diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai, tenang, dan aman.

3) Sebagai pedoman bagi perilaku siswa

Tata tertib sekolah dapat menjadi pedoman bagi perilaku para siswa dan dapat memotivasi siswa untuk dapat berperilaku atau bertindak sesuai dengan harapan sosial. Tata tertib sekolah juga menjadi salah satu unsur kedisiplinan perilaku siswa. Dengan begitu para siswa diharapkan mampu berperilaku sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lingkungan sekolah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata tertib berfungsi untuk mendidik dan membina perilaku siswa di sekolah, karena tata tertib berisikan keharusan yang harus dilaksanakan oleh siswa. Selain itu tata tertib juga berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku siswa, karena berisi larangan terhadap siswa tentang suatu perbuatan yang juga mengandung sanksi bagi siswa yang melanggarnya.

c. Tujuan Tata Tertib Sekolah

Tata tertib sekolah dibentuk untuk mengatur kegiatan sekolah sehingga tercipta suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban dan suasana yang damai dalam pembelajaran. Menurut Soedjono (1984) ada beberapa tujuan tata tertib sekolah, sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tercapainya tujuan Pendidikan nasional.
- 2) Meningkatkan ketangguhan sekolah.
- 3) Untuk membentuk mental, moral, dan watak anak agar terbiasa berbuat disiplin dan menanamkan berbagai norma luhur untuk dilaksanakan dan norma tuna susila yang wajib dihindari.
- 4) Menciptakan suasana yang bersih dan sehat bagi seluruh warga sekolah.
- 5) Menciptakan suatu kondisi yang teratur yang mencerminkan keserasian, keselarasan, serta keseimbangan baik pada tata ruang, tata kerja, tata pergaulan dan lain sebagainya di lingkungan sekolah.

Keberadaan tata tertib sekolah memegang peranan penting, yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah. Soelaeman (1985) berpendapat bahwa peraturan tata tertib itu merupakan alat guna mencapai ketertiban. Dengan adanya tata tertib itu adalah diharapkan untuk menjamin kehidupan yang tertib, tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Menurut Hurlock (1990) bahwa hanya dengan menghormati aturan-aturan sekolah anak bisa belajar lebih menghormati aturan-aturan umum lainnya, belajar mengembangkan kebiasaan, mengekang dan mengendalikan diri.

Peraturan bertujuan untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Jadi, tujuan tata tertib sekolah adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban dan suasana yang tertib dalam proses pembelajaran. Suasana sekolah yang tertib adalah yang program sekolahnya berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum dan tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

2. Sistem Poin Pelanggaran

a. Pengertian Sistem Poin

Menurut Sutarman (2012) sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian tujuan utama. Selanjutnya Achmadi (2010) mengemukakan bahwa sistem adalah sebuah tatanan yang menjelaskan adanya rangkaian komponen yang saling berhubungan, dan memiliki tujuan yang sama secara seimbang dan terkoordinasi serta serasi dalam waktu yang sudah terencana.

Sistem poin pelanggaran adalah pemberian sanksi atau hukuman atas setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa dengan memberikan sejumlah poin tertentu untuk setiap jenis pelanggaran sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa (Firdaus, 2015). Sistem poin merupakan salah satu kebijakan yang diambil sekolah untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah, masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecil dan besarnya pelanggaran (Susanto et al., 2013). Sistem poin merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin siswa, sistem ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan sanksi yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan siswa (Fitriwati et al., 2015). Penerapan sistem poin juga mempunyai kelebihan, diantaranya menghindari adanya hukuman dengan kekerasan fisik yang marak terjadi di sekolah-sekolah (Wijayanti, 2013). Dengan penerapan sistem poin juga diharapkan akan membuat para siswa jera dalam

melakukan pelanggaran kembali terhadap tata tertib sekolah tanpa harus melakukan hukuman fisik atau hukuman yang lainnya.

Masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda sesuai dengan tingkatan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. Jadi, semakin sering siswa melakukan pelanggaran maka poinnya akan semakin bertambah juga. Pihak sekolah akan memberikan peringatan kepada siswa yang bersangkutan ketika poinnya telah mencapai batas-batas tertentu. Adanya peringatan tersebut siswa merasa telah mendapat hukuman atas kesalahan (pelanggaran) yang telah diperbuatnya (Amnan, 2017). Diterapkannya sistem poin ini diharapkan para siswa dapat mempertimbangkan kembali ketika ingin melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lain.

Menurut Schaefer (1996) mengemukakan ada dua puluh pedoman dalam menjatuhkan hukuman kepada siswa yang melanggar disiplin sekolah. Dari dua puluh pedoman tersebut, terdapat enam pedoman yang mengilhami pemberlakuan sistem poin seperti berikut ini: 1) hukuman itu harus jelas dan terang, 2) hukuman harus konsisten, 3) hukuman diberikan dalam waktu secepatnya, 4) bentuk-bentuk hukuman yang diberikan sebaiknya melibatkan siswa, 5) pemberian hukuman harus objektif, 6) hukuman sebaiknya tidak bersifat fisik.

Jadi, dapat disimpulkan sistem poin pelanggaran merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pihak sekolah dalam rangka menegakkan tata tertib dan disiplin siswa di sekolah yang bertujuan agar siswa lebih jera dalam melakukan pelanggaran dan dengan sistem poin diharapkan siswa dapat terbiasa untuk bersikap disiplin baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat.

b. Pelaksanaan Sistem Poin

1) Tata Aturan Dalam Sistem Poin

Dalam pelaksanaan sistem poin, mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan kartu kuning (peringatan) yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Setiap poin pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa dikumpulkan sampai batas tertentu selama satu semester, jika poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa telah mencapai batas maksimal, maka kartu kuning tadi (peringatan) dapat dapat berubah menjadi kartu merah sebagai isyarat bahwa siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah (Hidayati, 2013).

Pelaksanaan sistem poin pelanggaran di lingkungan sekolah sebenarnya sangat sederhana. Setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib diberikan skor poin pelanggaran oleh guru dengan menulis nama, kelas, jenis pelanggaran dan jumlah poin pada kertas poin, kemudian kertas poin tersebut diserahkan ke bagian kesiswaan untuk di rekapitulasi ke dalam buku poin pelanggaran siswa (Taqiyya, 2013). Setelah poin direkapitulasi, siswa yang mempunyai poin pelanggaran tinggi akan dilakukan pemanggilan ke ruang bimbingan konseling untuk diberikan arahan dan dilakukan pemanggilan orang tua/wali bila diperlukan. Dengan begitu akan terjalin kerjasama antar orang tua siswa dengan pihak sekolah (Tjalla & Tain, 2004).

Menurut Ahmadi (2017) sebuah peraturan akan berjalan dengan lancar tidak terlepas dari dua hal yaitu, 1) hukuman atau sanksi; 2) penghargaan atau reward, dua hal ini tentunya akan dapat dilakukan melalui sistem poin pelanggaran.

Menurut Taqiyya (2013) bahwa siswa dapat diberi poin pelanggaran apabila dia melanggar tata tertib sekolah selama mereka:

- a) Berada dalam lingkungan sekolah, baik ketika sedang belajar, waktu istirahat, waktu ibadah, atau berada di kantin sekolah.
- b) Berada di lingkungan sekolah di luar jam belajar resmi, termasuk pada kegiatan les (pengayaan) di sore hari atau pada kegiatan ekstrakurikuler yang ditentukan sekolah.
- c) Memakai pakaian seragam sekolah, termasuk dalam perjalanan, baik ketika pergi sekolah maupun dalam perjalanan sepulang dari sekolah.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata aturan dalam sistem poin pelanggaran mewajibkan pemberian poin pelanggaran pada setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa, semakin berat pelanggaran yang dilakukan maka semakin besar pula bobot poin yang didapatkan. Sistem poin berlaku baik di dalam maupun di luar sekolah, selama siswa tersebut masih menjadi siswa di sekolah yang bersangkutan

2) Pihak Pelaksana atau Personel Sistem Poin

Personel dalam sistem poin adalah tim yang akan merencanakan dan melaksanakan rangkaian kegiatan dalam upaya menegakkan disiplin di sekolah dengan menggunakan bobot penilaian. Menurut Susanto (2015) personel sistem poin mempunyai kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan sistem poin dan mempunyai garis koordinasi satu dengan yang lain sehingga dalam penerapannya kepada siswa akan terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar komponen pelaksana. Melalui kerjasama dan komunikasi yang baik maka hasil yang akan dicapai dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pembagian tugas atau wewenang dalam sistem poin merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh aspek sekolah ini dilakukan karena bertujuan untuk mewujudkan struktur organisasi agar wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih jelas. Menurut Handoko (2000) bahwa pembagian kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya. Pembagian kerja merupakan rincian serta pengelompokan aktivitas-aktivitas yang semacam atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh satuan organisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana dalam sistem poin merupakan tim yang bertugas menjalankan serta merencanakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem poin dalam upaya menegakkan disiplin siswa, dalam pelaksanaannya pihak pelaksana mempunyai tugas serta wewenang masing-masing agar sistem poin di sekolah dapat berjalan sesuai harapan

3) Sosialisasi Sistem poin

Sosialisasi merupakan langkah yang harus diperhatikan dalam menyukseskan penerapan sistem poin di sekolah, dengan mensosialisasikannya dengan tepat terhadap seluruh warga sekolah, bahkan terhadap orang tua peserta didik. Sosialisasi ini penting agar seluruh warga sekolah mengenal dan memahami aturan dan tata tertib sekolah (Fitriyani, 2016). Sosialisasi perlu dilakukan secara matang kepada berbagai pihak agar peraturan sistem poin yang ditawarkan dapat dipahami dan diterapkan secara optimal, karena sosialisasi merupakan langkah

penting yang akan menunjang dan menentukan keberhasilan penerapan sistem poin (Mulyasa, 2012).

Menurut Hamid (2017) tahap pelaksanaan penerapan sistem poin dimulai dengan: (1) ketika penerimaan siswa-siswi baru yaitu tahap sosialisasi tentang tata tertib sekolah, skor pelanggaran dan lain-lain; (2) Penyusunan tata tertib secara bersama-sama antara wali murid dan pihak sekolah, sehingga wali murid ikut proaktif merencanakan tata tertib dan diharapkan ikut mengawasi pelaksanaan dan evaluasinya; (3) Sekolah secara rutin mengkomunikasikan perkembangan peserta didik kepada orang tua atau wali; (4) pertemuan rutin wali murid ketika penerimaan raport. Pertemuan ini diadakan rutin setiap 3 bulan sekali atau satu semester sekali dengan tujuan sebagai wahana silaturahmi, komunikasi, konsultasi dan informasi antara pihak sekolah dan orang tua. Kebijakan sistem poin pelanggaran yang diberlakukan kepada siswa dapat memotivasi siswa untuk berperilaku sesuai aturan sekolah (Karana, 2015).

Jadi, sosialisasi merupakan hal penting yang harus di perhatikan dalam penerapan sistem poin, melalui sosialisasi pihak sekolah dapat memberikan pengenalan dan pemahaman baik kepada orang tua siswa maupun siswa itu sendiri mengenai aturan dalam sistem poin pelanggaran agar penerapan sistem poin dapat berjalan dengan optimal serta mendapat persetujuan dari semua pihak.

c. Tujuan Penerapan Sistem Poin

Tujuan penerapan sistem poin pelanggaran bagi guru yaitu sebagai pedoman bagi guru serta pelaksana pendidikan dalam rangka menentukan nilai kepribadian siswa yang mencakup kelakuan, kerajinan, kerapian dan lebih memudahkan guru untuk mengontrol setiap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap siswa. Dengan mempunyai kepribadian yang tangguh maka diharapkan siswa untuk selalu bersikap yang baik sehingga menjadi insan yang berakhlak mulia (Ariananda et al., 2016). Sedangkan tujuan penerapan sistem poin bagi siswa adalah untuk memudahkan pemberian sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan siswa serta membuat siswa menjadi lebih disiplin dan tekun dalam aktivitas pembelajaran dan juga agar siswa selalu terbiasa untuk taat terhadap tata tertib dalam setiap aktivitas di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat (Susanto, 2015).

Menurut Hidayati (2013) tujuan penggunaan sistem poin yaitu dalam rangka membantu pelaksanaan penilaian non akademis (pendidikan karakter) yang hasilnya harus di pertanggung jawabkan kepada orang tua ataupun sekolah, baik melalui buku pencatatan poin ataupun dalam rapor. Selain itu agar siswa lebih memahami tata tertib sekolah, sehingga siswa dapat menerapkan peraturan tersebut secara baik, dengan demikian pelanggaran dapat di minimalisir dengan baik sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. Keberadaan sistem poin dalam tata tertib memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah agar lebih disiplin (Amnan, 2017).

Jadi, tujuan dari penerapan sistem poin yaitu untuk menumbuhkan karakter disiplin siswa sehingga menjadi individu yang berakhlak mulia. Tujuan tersebut secara umum sudah digunakan oleh berbagai sekolah dalam rangka untuk membuat siswa taat akan aturan karena dengan adanya partisipasi siswa yang taat akan aturan membuat lingkungan sekolah menjadi nyaman sehingga proses kegiatan belajar dan mengajar menjadi kondusif dan terarah.

3. Kedisiplinan

a. Pengertian Kedisiplinan

Secara etimologi disiplin berasal dari Bahasa latin “Disciplina” yang menunjukkan kepada kegiatan belajar dan mengajar, sedangkan dalam Bahasa Inggris “Discipline” diartikan sebagai tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri, dan kendali diri. Menurut Manulang (1981) bahwa dalam pembicaraan sehari-hari disiplin biasanya dikaitkan dengan keadaan tertib, artinya sesuatu keadaan dimana perilaku seseorang mengikuti pola-pola tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Witarsa (2002) mengemukakan bahwa kedisiplinan adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Disiplin adalah adanya kesediaan untuk mematuhi ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku (Sabri, 2005).

Menurut Prijodarmito (2004) disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Dalam Depdiknas (2006) disiplin adalah tingkat konsistensi dan konsekuen seseorang terhadap suatu

komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan. Imron (2012) membagi disiplin menjadi dua, antara lain:

1) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian (otoriter)

Menurut konsep ini peserta didik dikatakan memiliki kedisiplinan yang tinggi jika mau duduk tenang sambil memperhatikan penjelasan guru saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Peserta didik diharuskan menguyakan saja terhadap apa yang di kehendaki guru serta tidak boleh membantah. Dengan demikian guru dapat dengan bebas memberikan tekanan kepada peserta didik agar peserta didik takut dan terpaksa mengikuti apa yang diinginkan oleh guru.

2) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive (kebebasan)

Menurut konsep ini peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluas-luasnya, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab Tata tertib dan aturan-aturan dilonggarkan dan tidak perlu mengikat peserta didik. Peserta didik dibiarkan berbuat apa saja sepanjang itu baik dan tidak melanggar aturan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu keadaan sikap ketaatan dan kepatuhan pada peraturan, norma atau tata tertib, yang dilakukan secara sadar sebagai proses pengendalian diri untuk mencapai standar yang tepat dan tujuan yang diharapkan. Jadi, aspek terpenting dari disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan dan kesadaran menjalankan tata tertib dan ketentuan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

b. Fungsi Kedisiplinan

Sikap disiplin penting dan harus dimiliki oleh setiap siswa. Disiplin membantu siswa dalam proses pembentukan sikap, perilaku dan akan mengantarkan seorang siswa sukses dalam belajar dan ketika bekerja nanti. Adapun fungsi kedisiplinan menurut Tu'u (2004) yaitu sebagai berikut:

1) Menata kehidupan Bersama

Sikap disiplin diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, disiplin akan berpengaruh terhadap tata kehidupan bermasyarakat setiap individu. Sikap disiplin masing-masing anggota masyarakat akan membuat hubungan yang baik antara anggota masyarakat satu dengan anggota masyarakat yang lain. Hal ini disebabkan karena masing-masing anggota masyarakat bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga setiap anggota dapat menata kehidupan dengan baik.

2) Membangun kepribadian

Lingkungan yang memiliki sikap disiplin yang baik sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Terutama bagi siswa yang sedang membentuk kepribadiannya, maka dari itu kondisi lingkungan sekolah memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan kepribadian siswa. Lingkungan sekolah yang teratur, tertib, dan disiplin memiliki peran penting dalam membangun kepribadian yang baik. Selain lingkungan sekolah, untuk membangun kepribadian yang baik diperlukan pula lingkungan keluarga yang memiliki sikap disiplin yang baik, sehingga siswa setiap harinya akan terlatih untuk bertindak disiplin dengan penuh tanggung jawab.

3) Melatih kepribadian

Disiplin berfungsi untuk melatih kepribadian siswa, siswa harus berada pada lingkungan yang baik untuk berlatih membiasakan diri bersikap disiplin. Pada lingkungan sekolah siswa biasanya meniru sikap dari guru yang siswa segani, maka dari itu guru harus memberikan contoh sikap disiplin dan bertanggung jawab kepada siswa, sehingga siswa akan melatih kepribadiannya dengan meniru sikap disiplin dari guru tersebut baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Siswa yang sudah terbiasa menaati peraturan yang ada di lingkungannya, maka siswa tersebut telah melatih kepribadiannya untuk menjadi disiplin dan bertanggung jawab.

4) Menciptakan lingkungan kondusif

Lingkungan Pendidikan yang kondusif adalah lingkungan yang nyaman, tenang, dan tidak ada gangguan dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga siswa dan guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif maka pihak sekolah membuat peraturan sekolah yang diterapkan bagi semua warga sekolah. Peraturan sekolah yang diimplementasikan dengan baik dapat memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Karena lingkungan sekolah yang kondusif akan membuat siswa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran dan memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran.

5) Hukuman

Hukuman ialah sanksi yang diberikan kepada seseorang saat melanggar atau tidak menaati aturan yang ada di lingkungannya. Tanpa ancaman hukuman, dorongan ketaatan dan kepatuhan dapat menjadi lemah. Dengan adanya sanksi hukuman di sekolah siswa akan merasa takut untuk melanggar aturan yang ada, maka dari itu bentuk hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Hukuman diharapkan mempunyai nilai pendidikan, artinya siswa menyadari bahwa perbuatannya yang salah akan membawa akibat buruk dan harus ditanggung oleh dirinya sendiri.

Menurut Subroto (2001) disiplin sangat penting bagi perkembangan anak karena memenuhi beberapa kebutuhan tertentu antara lain: 1) membantu anak mengembangkan hati nurani, suara hati, membimbing dalam mengambil keputusan dan pengembangan tingkah laku, 2) memberi rasa aman dengan memberi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, 3) sebagai pendorong ego yang mendorong anak mencapai apa yang diharapkan darinya, 4) Persiapan mental yang kuat dan memungkinkan hidup menurut standar yang disetujui kelompok.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari kedisiplinan adalah untuk mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mengerti dengan segera untuk menjalankan kewajiban dan mengerti larangan-larangan yang berlaku. Serta mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Disiplin memiliki fungsi yang sangat sentral dalam mendukung terlaksananya proses belajar mengajar siswa di sekolah, dengan adanya disiplin maka tujuan pendidikan nasional akan mudah tercapai.

c. Tujuan Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan sebuah tindakan yang tidak menyimpang dari tata tertib atau aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain bahwa kedisiplinan sangat erat hubungannya dengan dengan peraturan, kepatuhan, dan pelanggaran (Handoku, 2008). Selanjutnya menurut Hurlock (1990) bahwa tujuan seluruh disiplin ialah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga ia akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya dan tempat individu itu di identifikasikan. Tujuan disiplin menurut Charles (1980) dibagi menjadi dua yaitu:

1) Tujuan jangka pendek

Disiplin bertujuan membuat anak-anak terlatih dan terkontrol dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah laku yang tidak pantas atau yang masih asing bagi mereka.

2) Tujuan jangka Panjang

Disiplin bertujuan untuk perkembangan pengendalian diri. yaitu dalam hal apa anak-anak dapat mengarahkan diri sendiri tanpa pengaruh pengendalian dari luar. Pengendalian diri berarti menguasai tingkah laku sendiri dengan berpedoman pada norma- norma yang jelas, standarstandar dan aturan-aturan yang menjadi miliknya sendiri.

Tujuan dasar diadakan disiplin menurut Fachrudin (1989) adalah: 1) membantu anak didik untuk menjadi matang pribadinya dan mengembangkan diri dari sifat-sifat ketergantungan ketidak bertanggung jawaban menjadi bertanggung jawab, 2) membantu anak mengatasi dan mencegah timbulnya problem disiplin dan

menciptakan situasi yang favorebel bagi kegiatan belajar mengajar di mana mereka mentaati peraturan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu, menurut Rachman (1999) bahwa tujuan pentingnya disiplin bagi para siswa, sebagai berikut: 1) memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, 2) mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar, 3) membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya, 4) siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat bagi dirinya serta lingkungannya.

Selanjutnya Suherman (2001) mengemukakan pula tentang pentingnya disiplin dalam proses pendidikan dan pembelajaran untuk mengajarkan hal-hal sebagai berikut:

1) Rasa hormat terhadap otoritas/kewenangan

Disiplin akan menyadarkan setiap siswa tentang kedudukannya, baik di kelas, maupun di luar kelas, misalnya kedudukannya sebagai siswa yang harus hormat terhadap guru dan kepala sekolah.

2) Upaya untuk menanamkan kerjasama

Disiplin dalam proses belajar mengajar dapat dijadikan sebagai upaya untuk menanamkan kerjasama, baik antara siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungannya.

3) Kebutuhan untuk berorganisasi

Disiplin dapat dijadikan upaya untuk menanamkan dalam diri setiap siswa mengenai kebutuhan organisasi.

4) Rasa hormat terhadap orang lain

Dengan dijunjung tingginya disiplin dalam proses belajar mengajar, setiap siswa kan tahu dan memahami tentang hak dan kewajibannya, serta akan menghormati dan meghargai hak dan kewajiban orang lain.

5) Kebutuhan untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan

Dalam kehidupan selalu dijumpai hal yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Melalui disiplin, siswa disiapkan untuk mampu menghadapi hal-hal yang kurang atau tidak menyenangkan dalam kehidupan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya.

Menanamkan kedisiplinan pada anak bertujuan untuk menolong anak memperoleh keseimbangan antara kebutuhan untuk berdikari dan penghargaan terhadap hak-hak orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penerapan disiplin sekolah adalah untuk mengontrol perilaku siswa agar tidak menyimpang dari nilai-nilai moral. Berdisiplin akan membuat siswa memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan suatu proses ke arah pembentukan watak yang baik.

d. Faktor-Faktor Pembentuk Kedisiplinan

Pembentukan kedisiplinan pada diri peserta didik pasti memiliki faktor-faktor yang mendukungnya. Tu'u (2004) mengemukakan bahwa ada tujuh faktor yang mempengaruhi pembentukan kedisiplinan, yaitu: kesadaran diri, lingkungan, keluarga, ketaatan, teladan, hukuman, dan latihan berdisiplin. Selanjutnya menurut Unaradjan (2003) terbentuknya disiplin diri dipengaruhi oleh dua faktor berikut antara lain: 1) faktor eksternal, yang dimaksud dalam hal ini adalah unsur-unsur

yang berasal dari luar pribadi yang dibina, faktor faktor tersebut yaitu keadaan keluarga, keadaan lingkungan sekolah, dan keadaan masyarakat, 2) faktor internal, yaitu unsur-unsur yang berasal dari dalam diri individu seperti keadaan fisik, dan keadaan psikis. Menurut Lembaga Ketahanan Nasional (1997) kedisiplinan dapat terjadi dengan cara:

- 1) Disiplin tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus ditumbuhkan, dikembangkan dan diterapkan dalam semua aspek, menerapkan sanksi serta dengan bentuk ganjaran dan hukuman.
- 2) Disiplin seseorang adalah produk sosialisasi sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sosial. Oleh karena itu pembentukan disiplin tunduk pada kaidah-kaidah proses belajar.
- 3) Dalam pembentukan disiplin, ada pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga mampu mempengaruhi tingkah laku pihak lain ke arah tangka laku yang diinginkannya. Sebaliknya pihak lain memiliki ketergantungan pada pihak pertama, sehingga ia bisa menerima apa yang diajarkan kepadanya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya disiplin individu dalam hal ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga saja, namun ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi pembentukan disiplin seseorang antara lain, kesadaran diri, hukuman, teladan, ketaatan, latihan berdisiplin, dan lingkungan dimana ia berada.

B. Kerangka Konseptual

Dunia pendidikan saat ini banyak sekali menghadapi problematika dan rintangan, diantaranya adalah masalah kedisiplinan. Saat ini banyak pelajar yang tidak lagi menghiraukan tata tertib yang ada, baik di lingkungan formal maupun nonformal. Perilaku-perilaku menyimpang yang dimaksudkan seperti merokok di lingkungan sekolah, narkoba, meminum-minuman keras (alcohol), tawuran sesama pelajar dan masih banyak lagi. Dari berbagai pelanggaran peraturan sekolah yang sering terjadi, menuntut sekolah untuk memberikan peringatan atau hukuman seefektif mungkin untuk menanggulangi peningkatan pelanggaran peraturan sekolah yang dilakukan oleh siswa.

Sekolah harus membuat hukuman positif yang efeknya tetap membuat jera para pelanggar tata tertib sekolah, salah satunya dengan menerapkan sistem poin. Sistem poin adalah suatu kebijakan yang diambil sekolah guna mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Sistem poin ini diberlakukan pada tata tertib sekolah. Dalam tata tertib sekolah setiap kesalahan atau pelanggaran dikenakan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesalahannya. Setiap siswa yang melanggar peraturan akan diberikan poin sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Poin itu akan bertambah jika siswa melakukan pelanggaran kembali. Ada batasan maksimal poin yang akan membuat siswa diberhentikan dari sekolah. Setiap siswa yang mendapatkan poin akan diberitahukan pada orang tuanya. Dengan begitu akan terjalin kerjasama antara orang tua siswa dengan pihak sekolah

Di lingkungan formal seperti sekolah, tata tertib dibuat untuk mengontrol perilaku-perilaku siswa yang menyimpang guna membentuk kedisiplinan pada

saiwa. Pembentukan kedisiplinan bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil Pendidikan. Proses dari pembentukan disiplin tersebut dilakukan melalui penegakan tata tertib siswa di sekolah. Jadi, dengan diterapkannya sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja ini diharapkan dapat memberi efek jera dan menjadi alat pengontrol tingkah laku para siswa dalam kehidupan sehari-hari dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam peningkatan kedisiplinan siswa.



Gambar 2. 1 Kerangka konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif, yang berusaha mengungkapkan kejadian yang ada di lokasi penelitian secara menyeluruh melalui pengumpulan data secara alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci untuk mencari makna. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskriptif holistik, yang menjelaskan secara detil tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung dari pada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang.

Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan atau menggambarkan keadaan objek yang di teliti sebagaimana adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Berdasarkan pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, maka peneliti ingin memperoleh informasi yang akan menghasilkan gambaran mengenai penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian mengambil peran sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti yang berperan sebagai instrumen utama dalam pelaksanaan penelitian sangat berperan penting di lokasi penelitian terutama dalam melakukan observasi langsung. Selain itu instrumen lainnya yang digunakan oleh peneliti berupa pedoman dalam melakukan wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi.

C. Lokasi Penelitian

SMA Negeri 5 Tana Toraja, merupakan salah satu Sekolah Menengah atas yang ada di Jl. Nusantara No. 69A Makale. Jumlah siswa dalam setiap kelas kurang lebih 32 orang, dengan jumlah rombongan belajar (rombel) mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 adalah 24. SMA Negeri 5 Tana Toraja saat ini dipimpin oleh Drs. Marten Leme Piri, M.Pd dan memiliki 54 tenaga pendidik.

Penentuan tempat penelitian dimaksudkan untuk memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian. Peneliti memilih SMA Negeri 5 Tana Toraja karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Tana Toraja yang menerapkan sistem poin pelanggaran dengan baik. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang akan diperoleh dalam penelitian ini untuk mengetahui seperti apa penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Negeri 5 di Kabupaten Tana Toraja yang bersumber melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi dari Wakasek bidang kesiswaan, Guru BK, wali kelas dan siswa.

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yang akan dijadikan partisipan oleh peneliti adalah sekelompok objek yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian, dapat berupa manusia, benda-benda, dokumen-dokumen, situasi serta keadaan seperti proses pembelajaran dan sebagainya yang terlibat langsung dalam pembentukan disiplin siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja.

D. Deskripsi Fokus

Fokus penelitian merupakan masalah atau hal yang membingungkan akibat adanya keterkaitan antar beberapa faktor. Sehingga pengambilan fokus sangat diperlukan dalam suatu penelitian agar dapat memperjelas sesuatu hal yang biasa karena pengambilan fokus secara efektif dapat menetapkan kriteria inklusi-eksklusi sehingga dapat menyaring informasi yang masuk. Jadi, dengan menetapkan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang (Moleong, 2018).

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

- 1) Gambaran penerapan sistem poin pelanggaran dalam hal latar belakang penerapan, pihak pelaksana (SDM), tata aturan, prosedur penanganan, serta faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan.
- 2) Dampak penerapan sistem poin pelanggaran yang meliputi, dampak sistem poin terhadap tingkat kedisiplinan siswa dan perbedaan kedisiplinan siswa sebelum dan setelah sistem poin di berlakukan.

E. Sumber Data

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan informan pada penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut: 1) wakasek bidang kesiswaan, 2) guru bimbingan konseling (BK), 3) wali kelas, 4) siswa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber atau informan untuk memperoleh informasi terkait dengan penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau informan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur dimulai dari pertanyaan umum secara luas pada topik penelitian.

Wawancara terstruktur yang dilakukan untuk memperoleh data pokok tentang penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa

di SMA Negeri 5 Tana Toraja serta wawancara tidak terstruktur untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara terstruktur. Wawancara dilakukan dengan wakasek bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling, wali kelas dan beberapa siswa.

2. Observasi

Observasi penting dalam penelitian kualitatif dengan salah satu alasannya yaitu teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Sebuah informasi, data dan fakta semakin dapat dipercaya jika dapat disaksikan secara langsung melalui pengamatan yang dilakukan.

Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian dapat digunakan peneliti untuk memperoleh data tentang beberapa siswa yang melanggar tata tertib sekolah serta melihat secara langsung tindakan pihak sekolah yang berwenang untuk mengatasi masalah tersebut. Observasi dimaksudkan sebagai pengamatan dan pencatatan terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Observasi memungkinkan melihat dan mengamati berbagai perilaku dan kejadian sebagaimana keadaan sebenarnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini yakni dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan sistem poin dan kedisiplinan siswa, visi dan misi sekolah, tata tertib, dokumentasi dengan guru dan siswa pada saat melakukan wawancara dan keadaan sekolah yang mendukung peningkatan kedisiplinan siswa.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang penting dan wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena tanpa melakukan analisis data maka kita tidak akan mendapatkan temuan dari penelitian tersebut dan hanya akan melahirkan data mentah saja. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles & Huberman (2014), langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (*triangulasi*). Proses pengumpulan data melibatkan sisi informan, aktifitas, latar atau konteks terjadinya peristiwa. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti, kemudian mencatat dan merekam semua hal yang dilihat dan didengar. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan peneliti saat melakukan pengumpulan data di lapangan antara lain: a) tentukan jenis penelitian, b) fokus pada objek penelitian, c) membuat pertanyaan analitis, d) memulai dari yang makro, e) mengomentari gagasan.

2. Kondensasi Data (*data condensation*)

Dalam kondensasi data merujuk pada proses menyeleksi, memfokuskan, mengabstrakkan, menyederhanakan dan mentransformasikan data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a) *Selecting* (menyeleksi)

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b) *Focusing* (memfokuskan)

Memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap ini peneliti memfokuskan data sesuai dengan masing-masing rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data, peneliti hanya membatasi data berdasarkan rumusan masalah.

c) *Abstracting* (mengabstrakkan)

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul hingga ke tahap focusing dievaluasi oleh peneliti, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d) *Simplifying and Transforming* (menyederhanakan dan mentransformasikan)

Data yang sudah melalui beberapa tahap hingga tahap abstraksi dalam penelitian, selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas dan sebagainya.

3. Penyajian data (data display)

Setelah kondensasi data, maka langkah selanjutnya adalah *display* data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja

penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal.

Dalam penelitian kualitatif, selain menggunakan teks naratif, penyajian data juga bisa dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Penyajian data dalam hal ini penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari informan sesuai dengan fokus penelitian ini disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan penerapan sistem poin dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja.

4. Kesimpulan dan verifikasi (*concluding drawing/verification*)

Langkah keempat dalam analisis data menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti ini disebut sebagai verifikasi data. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama, mengelompokkan, dan mencari kasus-kasus negatif (kasus khas, berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat).

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah peneliti yang dilakukan benar-benar merupakan peneliti ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Tujuan triangulasi ialah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber (Moleong, 2018).

Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti mengenai keabsahan datanya sehingga memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Menurut Moloeng (2018) dalam penggunaan teknik triangulasi terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).

1) Derajat kepercayaan (credibility)

Uji credibility merupakan uji kepercayaan dari data yang telah dihasilkan selama proses penelitian kualitatif. Uji credibility dapat dilakukan dengan

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

2) Keteralihan (transferability)

Transferability atau keteralihan merupakan validasi eksternal dalam penelitian kualitatif. Validasi eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Bagi peneliti, nilai transfer bergantung pada pemakai, hingga mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain.

3) Kebergantungan (dependability)

Dalam penelitian kualitatif dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit secara keseluruhan aktivitas yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya dimulai ketika peneliti mulai menentukan masalah/fokus, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pembuatan kesimpulan pengamatan.

4) Kepastian (confirmability)

Confirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji

confirmability berarti menguji hasil penelitian. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji credibility (uji kredibilitas). Uji kredibilitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Sugiyono (2019) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode/teknik.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali data atau informasi yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah wakasek kesiswaan, guru BK, wali kelas, dan siswa. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana yang memiliki pandangan sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan

data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. Dalam penelitian ini peneliti mengungkapkan data seperti apa penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa yang ada di sekolah tersebut.

I. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dan proses dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap pra-lapangan yaitu melakukan studi awal untuk melihat fenomena yang terjadi di lapangan sebagai bahan penelitian yang akan dilakukan. Tahap ini meliputi kegiatan penyusunan rancangan penelitian yang memuat konteks penelitian dan alasan pelaksanaan penelitian, studi pustaka, penentuan lokasi penelitian, jadwal penelitian, pemilihan alat penelitian, rancangan pengumpulan data, prosedur analisis data, rancangan pengecekan keabsahan data, dan rancangan perlengkapan di lapangan.

2. Tahap penelitian

Tahap penelitian merupakan pekerjaan lapangan yang menuntut peneliti untuk mencari dan mengumpulkan sumber data seakurat mungkin dengan melakukan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan beberapa alat bantu seperti alat rakam dan sebagainya untuk membantu peneliti dalam memperoleh data selama di lapangan.

3. Tahap analisis data

Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan setelah mendapatkan sumber data dari hasil penelitian di lapangan. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini harus segera melakukan analisa data yang dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data sehingga data yang diperoleh benar-benar valid sebagai acuan untuk menemukan sebuah makna.

4. Tahap pembuatan laporan

Tahap ini meliputi penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di deskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari data menyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Berikut deskripsi hasil penelitian melalui prosedur pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara yang telah diperoleh. Berdasarkan penelusuran data di lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut.

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum SMA Negeri 5 Tana Toraja

SMA Negeri 5 Tana Toraja beralamat di jalan Nusantara No 69A, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, Kode pos 91811. Pada awalnya berdirinya merupakan sekolah Pendidikan guru (SPG) kemudia pada tahun 1989 beralih menjadi SMA dengan nama SMA Negeri 3 makale, kemudian pada tahun 2018 berubah nama menjadi SMA Negeri 5 Tana Toraja. Letaknya yang berada di pusat ibukota kabupaten sehingga mudah di akses baik menggunakan angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

a. Visi dan Misi SMA Negeri 5 Tana Toraja

1) Visi

Sekolah yang disiplin, kompetitif, kredibel berdasarkan iman dan taqwa.

2) Misi

- a) Meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa dalam PBM
- b) Meningkatkan prestasi di bidang akademik dan OSN
- c) Meningkatkan prestasi dalam bidang eskul sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa
- d) Menyelenggarakan program Pendidikan yang berakar pada system nilai, penghayatan terhadap ajaran agama dan budaya
- e) Mewujudkan sekolah yang indah, asri, damai, nyaman dan aman

b. Identitas Sekolah

Identitas sekolah dapat dilihat sebagai berikut:

Nama sekolah	: SMA Negeri 5 Tana Toraja
Kepala Sekolah	: Drs. Marthen Leme Piri, M.Pd
Status	: Negeri
Nomor statistik sekolah	: 301191801002
Jalan	: Nusantara No 69 A
Kelurahan	: Bombongan
Kecamatan	: Makale
Kabupaten/Kota	: Tana Toraja
Tahun berdiri	: 1989 (peralihan SPG ke SMA)
NPSN	: 40309865
Luas lahan	: 2.591 m ²
Luas Bangunan	: 2330,55 m ² (bangunan lantai 2 & 3)
Telepon	: 0423-26437
Email	: sman5tator@gmail.com
Website	: sman5tator.sch.id

c. Keadaan Guru, Pegawai, dan Siswa

1) Keadaan guru dan pegawai

berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi, SMA Negeri 5 Tana Toraja memiliki 54 orang tenaga pendidik baik yang berstatus pegawai negeri maupun yang berstatus tenaga honorer, dan untuk staf pegawai terdapat 4 staf di bagian tata usaha, 2 staf di bagian keamanan, 1 staf perpustakaan, 1 staf bagian kebersihan, dan 1 staf bagian dapur.

2) Keadaan Siswa

Berdasarkan data yang diperoleh melalui dokumentasi diperoleh jumlah siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja sebanyak 855 siswa yang terdiri dari 278 laki-laki dan 577 perempuan. Tiap Angkatan terdiri dari tiga jurusan, jurusan IPA terdiri dari empat rombel, jurusan IPS tiga rombel, dan Bahasa satu rombel.

3) Fasilitas Sekolah

SMA Negeri 5 Tana Toraja memiliki fasilitas sekolah yang tergolong baik, bersih, nyaman, dan selalu siap untuk digunakan. Mulai dari lapangan basket, lapangan volley, dan lapangan upacara, selain itu terdapat pula fasilitas lainnya sebagai penunjang berlangsungnya proses belajar mengajar.

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian merupakan bagian yang akan mendeskripsikan penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Negeri 5 Tana Toraja yang meliputi latar belakang penerapan sistem poin, pihak pelaksana, tata aturan, prosedur penanganan, kendala-kendala pelaksanaan, dan

dampaknya terhadap kedisiplinan siswa. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober sampai dengan 2 November 2021. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Adapun sumber data di dapatkan dari dokumen-dokumen yang relevan dan informan wawancara meliputi wakasek bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling, wali kelas, dan siswa.

a. Gambaran Penerapan Sistem Poin

1) Latar Belakang Penerapan Sistem Poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja

Pada tahun ajaran 2008/2009 sekolah membuat kebijakan baru yaitu menerapkan sistem poin dalam tata tertib sekolah. Dimana setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib akan dikenakan poin sesuai aturan yang telah ada. Sistem poin merupakan sebuah kebijakan yang diambil guna mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah. Seperti yang dikemukakan oleh AS, selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan bahwa:

“sistem poin diterapkan tahun ajaran 2008/2009, yang pertama kali mencetuska itu adalah kurikulum, kesiswaan, BK, dan disetujui oeh kepala sekolah dengan melihat pada saat itu maraknya siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib, dan jenis pelanggaran itu bervariasi. Jadi bagaimana sehingga pembinaan siswa yang malanggar itu bisa berlangsung secara adil, seperti mempermudah penanganan terhadap sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan agar adanya kejelasan tentang catatan pelanggaran siswa sehingga diterapkanlah sistem poin, sistem poin dipilih dikarenakan pelaksanaannya yang mudah dimengerti baik pihak sekolah, wali siswa dan terutama siswa itu sendiri dan juga kita telah melihat kesuksesan sistem poin di sekolah tetangga kita, dimana tingkat pelanggaran siswanya menurun setelah diterapkannya sistem poin, jadi kita tidak ragu lagi untuk menerapkan sistem poin di sekolah kita ini”. (27/10/21_AS)

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan:

“sistem poin saat itu diterapkan dari jamannya pak Eli Tawan masih menjadi kepek tahun 2008, dikarenakan banyaknya siswa yang sering bolos dan tanpa keterangan dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya dan terlebih saya melihat bahwasanya dalam penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan siswa ada sebuah ketimpangan, dimana sebagian guru terkesan membeda-bedakan siswa. misalnya ada hubungan keluarga yah biasanya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anak yang lain, hal inilah yang mau kita ubah sehingga kita terapkan sistem poin ini, kan dalam sistem poin semua pelanggaran bobot poinnya sama, jadi mau dia anak kepala daerah atau siapapun tetap akan mendapatkan sanksi yang sama seperti siswa lainnya”
(27/10/21_YRP)

Berdasarkan pernyataan beberapa informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang penerapan sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja adalah untuk menegakkan disiplin siswa dan mempermudah penanganan terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa, serta menghindari adanya perilaku membeda-bedakan siswa dalam penanganan pelanggaran tata tertib. Sistem poin pelanggaran diterapkan pada tahun ajaran 2008/2009 sampai sekarang.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan selama peneliti berada di lokasi penelitian pada 27 oktober – 2 November 2021. Sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Tana Toraja SMA Negeri 5 terus melakukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswanya salah satunya dengan penerapan sistem poin pelanggaran, hal ini di latar belakang karena maraknya pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Letaknya yang tepat berada di pusat Ibukota Kabupaten tentunya akan menjadi perhatian masyarakat bila ada siswa yang bolos ataupun melakukan kegiatan yang tidak senonoh di luar lingkungan sekolah misalnya merokok, hal ini tentunya akan merusak nama baik

sekolah, dan dengan adanya sistem poin siswa yang melakukan pelanggaran akan lebih muda untuk dibina karena sistem poin di sekolah ini berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah sehingga masyarakat bisa melaporkan jika ada siswa yang terlihat melakukan pelanggaran di luar sekolah.

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang penerapan sistem poin pelanggaran di SMAN 5 Tana Toraja yaitu dikarenakan maraknya kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Sehingga pihak sekolah berupaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Sistem poin memiliki kelebihan di antaranya pemberian sanksi terhadap siswa yang melanggar bisa berlangsung secara adil, mempermudah penanganan terhadap sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, dan adanya kejelasan tentang catatan pelanggaran siswa, serta menghindari adanya perilaku membeda-bedakan siswa dalam proses pembinaan pelanggaran tata tertib. Sistem poin dipilih dikarenakan pelaksanaannya yang mudah dipahami oleh pihak sekolah maupun siswa dan orang tua siswa.

2) Pihak Pelaksana Sistem Poin Pelanggaran

a. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem poin di sekolah

Pelaksanaan sistem poin pelanggaran di sekolah tentunya memerlukan kerjasama antar semua personil sekolah. Melalui Kerjasama dan komunikasi yang baik hasil yang akan dicapai dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Data berikut menunjukkan tugas dan wewenang tiap pelaksana dalam sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja Pelaksana dalam sistem poin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Pelaksana sistem poin pelanggaran

No	PELAKSANA	TUGAS
1	Kepala Sekolah	Penanggung jawab
2	Bidang Kesiswaan	Pengawas/koordinator
3	Guru Bimbingan konseling	Pemberi Sanksi tingkat lanjut (bimbingan)
4	Wali kelas	Penasihat siswa, komunikasi dengan wali siswa
5	Guru mata pelajaran, Guru piket, Staf pegawai	Pemberi poin dan mengawasi kedisiplinan siswa

Sumber: wawancara wakasek bidang kesiswaan

Sejalan dengan data di atas dikemukakan pula oleh AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan:

“tentu penanggung jawab utama adalah kepala sekolah, dan juga termasuk guru dan staf pegawai semua ikut berperan dalam pelaksanaan sistem poin di sekolah. Kemudian ditindak lanjuti oleh kesiswaan yang diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk menangani sistem poin ini, yang mana di kesiswaan ada tiga staf yang terdiri dari guru, kemudian saya bagi tugas tiap guru itu untuk mencatat/menginput poin siswa tiap kelas/tingkatan, untuk kelas 12 ditangani oleh bapak S, untuk kelas 10 ditangani oleh bapak A, untuk kelas 10 oleh ibu D”. (27/10/21_AS)

Kemudian disampaikan oleh YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan:

“Jadi dalam penerapan sistem poin di sekolah seluruh jajaran guru dan staf pegawai turut andil dalam pelaksanaannya, jadi pegawai pun berhak untuk memberikan poin ke siswa yang melanggar tatib, hanya saja jarang-jarang terjadi itu pegawai yang memberikan poin mungkin karena memang mereka tidak berhadapan langsung dengan siswa beda dengan kita yang guru-guru. Peran Guru BK bekerjasama dengan kesiswaan dan wali kelas untuk melakukan bimbingan kepada siswa yang poinnya sudah tinggi, maka dari bimbingan itu sehingga kita bisa tau mengapa siswa ini sering melanggar tata tertib agar kiranya bisa diberikan solusi dari masalah yang ia hadapi. Dalam sistem poin sudah di atur bahwa nanti setelah siswa mendapatkan poin baru di bimbing sehingga yang bisa kita lakukan adalah fungsi pencegahan (preventif) dan fungsi perbaikan artinya kita cegah agar tidak melakukan pelanggaran lagi dikemudian hari. (27/10/21_YRP)

Dikemukakan juga oleh PT, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5

Tana Toraja menyatakan:

“semua pihak sekolah bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem poin, jadi tidak ada dikatakan bahwa cuma pihak ini yang bertanggung jawab, intinya semua pihak sekolah ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Peran guru BK yaitu melakukan pembinaan bersama wali kelas, kesiswaan dan orang tua jika poin siswa sudah tergolong tinggi, jadi dalam pembinaan BK tidak bisa sendiri melakukannya karena aturan dalam sistem poin sudah begitu hanya 3 kali pembinaan dimana pembinaannya dilakukan secara bersama-sama, tapi kita juga bisa melakukan pembinaan khusus dari BK jika anak tersebut masih terus melanggar tata tertib, karena itu sudah jadi tugasnya kita untuk membina para siswa dan pembinaan ini kita lakukan diluar dari sistem poin. (27/10/21_PT)

Kemudian dipertegas oleh SP, selaku wali kelas sekaligus guru sejarah di

SMAN 5 Tana Toraja menyatakan:

“pihak pelaksana atau yang bertanggung jawab dalam penerapan sistem poin adalah kepala sekolah dan semua guru termasuk juga pegawai. Tugas wali kelas ialah menerima rekapan poin pelanggaran dari kesiswaan dan melakukan pemanggilan siswa dan wali siswa apabila poinnya sudah memenuhi untuk dilakukan pemanggilan yang selanjutnya dilakukan pembinaan bersama kesiswaan dan guru BK”. (29/10/21_SP)

Dari data dan pendapat beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem poin disekolah merupakan tanggung jawab semua warga sekolah. Bukan hanya guru yang berhak memberikan poin pelanggaran tetapi pegawai juga mempunyai wewenang untuk memberikan poin kepada siswa yang kedapatan melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan tugas setiap personil sekolah dalam sistem poin juga sudah tertata dengan baik.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan selama peneliti berada di lokasi penelitian pada 27 oktober – 2 November 2021. Setiap guru yang mendapatkan siswa yang melakukan pelanggaran berhak

untuk memberikan poin kepada siswa tersebut, selama peneliti berada di lokasi penelitian peneliti mengamati terkadang ada saja siswa yang keluar dari kelas untuk menghadap ke guru piket untuk meminta kertas poin pelanggaran dikarenakan kedatangan malakukan pelanggaran tata tertib oleh guru yang mengajar di kelas dan kebanyakan pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak membawa buku paket. Selain itu ada tiga orang siswa yang kedatangan oleh guru karena meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran masih berlangsung dan asik bercerita di toilet karena pada saat itu guru yang mengajar di kelasnya berhalangan untuk masuk mengajar maka siswa tersebut langsung diberikan kertas poin pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana sistem poin di sekolah merupakan tanggung jawab semua guru dan setiap guru yang mendapatkan pelanggaran tata tertib berhak untuk memberikan poin kepada siswa yang bersangkutan.

b. Kesadaran para guru dalam pelaksanaan sistem poin

Peran guru sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan siswa dalam proses belajar mengajar sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sistem poin, karena tanpa adanya kesadaran dan pengawasan yang baik dari pihak sekolah tata tertib siswa tidak akan berjalan dengan baik. Dikemukakan oleh AS, selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja bahwa:

“kesadaran para guru bisa saya katakan bahwa umumnya guru sadar dan ikut serta dalam mempertanggung jawabkan sistem poin, hanya saja bagaimanapun juga namanya kita manusia punya karakter yang berbeda-beda kadang juga ada yang komplain sendiri terhadap poin yang ada bilamana siswa itu sudah mau mengarah ke finish atau dikembalikan ke orang tua”. (27/10/21_AS)

Hal ini senada dengan yang dikemukakan YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan:

“Kalau saya lihat kesadaran guru dan pegawai dalam pelaksanaan sistem poin itu menurut saya semuanya sudah bagus tapi mungkin biasa ada-ada saja beberapa guru yang malas kasih poin misalnya lupa kerja tugas atau jikalau dia tahu kalau poin siswa ini sudah tinggi, kan siswa-siswa kita ini sudah kita anggap anak sendiri jadi kadang kita tidak tega jika ada siswa yang harus keluar atau DO karena cukup poinnya”.
(27/10/21_YRP)

Kemudian ditambahkan oleh HK, selaku guru matematika di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan bahwa: “Dari kesadaran para guru sejauh ini yang saya amati bahwa semua guru sadar dan mengerti soal tanggung jawabnya menjalankan sistem poin”. (29/10/21_HK)

Dari beberapa pernyataan informan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran para guru dalam menjalankan sistem poin sudah cukup baik, hanya saja ada beberapa guru yang terkadang enggan untuk memberikan poin pelanggaran terhadap siswa yang melanggar tata tertib dikarenakan tidak tega jika siswanya harus di dikeluarkan dari sekolah, ataupun karena alasan lainnya.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada Rabu 27 Oktober – 2 November 2021. Kesadaran para guru dalam pelaksanaan sistem poin sudah cukup baik, hanya saja dari pengamatan peneliti beberapa guru memberikan contoh yang kurang baik yaitu dengan merokok di lokasi sekolah yang mungkin saja hal seperti ini bisa ditiru oleh siswa. Hal ini tentunya tidak mencerminkan aturan sistem poin pelanggaran yang mana jika siswa kedapatan merokok di dalam maupun di luar lokasi sekolah, memakai perhiasan berlebihan, dan pakaian yang ketat akan dikenakan poin pelanggaran.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa semua pihak sekolah baik guru maupun pegawai turut dalam pelaksanaan serta

pengawasan poin pelanggaran. Prosedur pelaksanaannya sendiri sudah dijalankan oleh komponen pelaksana kebijakan sesuai tugas dan fungsinya, akan tetapi tidak semua komponen melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

3) Tata Aturan Sistem Poin Pelanggaran SMA Negeri 5 Tana Toraja

Sistem poin ini berlaku kepada semua siswa yang berkaitan dalam pelanggaran, sehingga tidak adanya unsur pilih-pilih siswa dalam memberi poin. Sistem poin dalam tata tertib mempermudah untuk menertibkan siswa. Bobot poin tiap pelanggaran, sanksi atau hukuman, dan reward (penghargaan) dalam sistem poin di SMAN 5 Tana Toraja dapat dilihat sebagai berikut.

a. Bobot poin pada setiap pelanggaran tata tertib

Setiap jenis pelanggaran memiliki bobot poin yang berbeda, tergantung dari tata tertib apa yang dilanggar, bobot poin terendah adalah 3 poin jenis pelanggarannya misalnya tidak memakai atribut sekolah yang lengkap dan jenis poin pelanggaran dengan bobot poin tertinggi yaitu 100 jenis pelanggarannya misalnya menggunakan obat-obatan terlarang dan memukul guru, pada poin 100 artinya siswa langsung diberhentikan dari sekolah. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.

b. Sanksi sistem poin pelanggaran

Dari data yang diperoleh dari buku tata tertib dan poin pelanggaran, siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dicantumkan dalam tata tertib dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a) Peringatan lisan kepada siswa yang bersangkutan
- b) Memberikan poin sesuai dengan jenis pelanggarannya
- c) Pemanggilan orang tua / wali siswa
 - Pemanggilan pertama 30 poin
 - Pemanggilan kedua 50 poin
 - Pemanggilan ketiga 70-85 poin
- d) Siswa yang akumulasi poinnya 100 di kembalikan kepada orang tuanya (DO).

c. Reward (penghargaan) sistem poin pelanggaran

Dalam buku tata tertib dan poin pelanggaran tertuang mengenai penghargaan (reward) kepada siswa berupa pengurangan sistem poin pelanggaran.

Reward diberikan kepada siswa yang:

- a) Memperoleh prestasi akademik dan non akademik secara perorangan
 - Tingkat internasional juara 1 sampai 3 (pengurangan 100 poin)
 - Tingkat nasional juara 1 sampai 3 (pengurangan 75 poin)
 - Tingkat propinsi juara 1 sampai 3 (pengurangan 50 poin)
 - Tingkat kabupaten juara 1 sampai 3 (pengurangan 25 poin)
 - Ranking umum 1,2,3 (pengurangan 10 poin)
 - Ranking kelas 1,2,3 (pengurangan 5 poin)
- b) Mengikuti kegiatan akademik dan non akademik secara tim
 - Tingkat internasional (pengurangan 80 poin)
 - Tingkat nasional (pengurangan 60 poin)
 - Tingkat propinsi (pengurangan 40 poin)

- Tingkat kabupaten (pengurangan 20 poin)
- c) Setiap kenaikan kelas akumulasi poin siswa kembali menjadi 0 atau diputihkan.

Dari data yang disajikan di atas maka dapat dikatakan bahwa, tata aturan dalam sistem poin pelanggaran sudah tertata dengan baik mulai dari jumlah poin tiap jenis pelanggaran, sanksi dari jumlah poin yang didapatkan, dan reward atau penghargaan yang diberikan kepada siswa berupa pengurangan jumlah poin. Seperti yang dikemukakan AS, selaku wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan:

“jadi setiap kenaikan kelas, pelanggaran atau poin siswa dari tahun ajaran sebelumnya diputihkan atau kembali menjadi nol, jadi jumlah poin hanya berlaku selama satu tahun ajaran. bisa juga dilakukan pengurangan poin jika siswa mendapat prestasi semisal ikut olimpiade dan juara, jika dia punya poin akan di kurangi sesuai aturan dalam tata tertib”. (27/10/21_AS)

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan: “jadi kalau kenaikan kelas poin siswa kembali ke semula atau nol lagi dan biasa juga ada pengurangan poin jikalau siswa tersebut mendapat prestasi, dan nanti poin 100 yah sudah di DO, itu sudah lengkap dijelaskan dalam buku tatib siswa”. (27/10/21_YRP)

Kemudian dipertegas oleh SP, selaku guru sejarah di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan: “setiap pelanggaran itu ada poinnya masing-masing beserta sanksinya, intinya siswa yang sudah cukup poin 100 akan dikembalikan ke orang tuanya”. (29/10/21_SP)

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa akumulasi poin siswa hanya berlaku selama satu tahun ajaran, setiap kenaikan kelas jumlah poin siswa akan kembali menjadi nol (0), siswa yang mendapatkan prestasi akan mendapatkan pengurangan poin, dan siswa yang akumulasi poin pelanggarannya sudah mencapai 100 maka akan di keluarkan dari sekolah.

Untuk memudahkan pengelolaan poin pelanggaran siswa maka diperlukan peraturan yang jelas terutama dalam pencatatan poin siswa, di SMA Negeri 5 Tana Toraja setiap kertas poin pelanggaran dikumpulkan ke bagian kesiswaan, Seperti yang dikemukakan oleh AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan: “Setiap piket atau guru yang melihat bahwa ada pelanggaran yang dilakukan siswa lalu kertas poin itu diberikan kepada kami kesiswaan untuk di input, setelah di input maka disinilah bisa ketahuan bahwa anak ini sudah cukup poin maka dibuatkanlah daftar pembinaan”. (27/10/21_AS)

Sejalan dengan itu YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja mengatakan bahwa:

“Untuk alur pencatatan poin itu nak setiap guru yang memberikan poin ke siswa yang melanggar, kertas poin itu dikumpulkan di kesiswaan atau biasa jika tidak ada kesiswaan dikumpulkan ke guru piket dulu kemudian nanti piket yang berikan ke kesiswaan, jadi nanti di kesiswaan ada yang bertugas untuk menginput itu poin yang didapat oleh siswa”. (27/10/21_YRP)

Kemudian di pertegas oleh SP, selaku guru sejarah di SMAN 5 Tana Toraja yang mengatakan: “kertas poin itu asalnya dari bisa dari guru atau piket kemudian ke kesiswaan dan selanjutnya di input oleh yang sudah bertugas”. (29/10/21_SP)

Berdasarkan beberapa pendapat informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam alur pencatatan poin, setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa ditulis di kertas poin pelanggaran dan selanjutnya kertas poin tersebut dikumpulkan di bagian kesiswaan untuk selanjutnya dilakukan penginputan oleh pihak kesiswaan.

Selain data di atas, peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Senin, 1 November 2021, tata aturan dalam sistem poin pelanggaran sudah terlaksana dengan mekanisme mulai dari pemberian poin sampai penginputan poin, peneliti mengamati bahwa setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa sudah diberikan poin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti saat ada siswa yang terlambat maka akan diberikan lima (5) poin, guru piket dan satpam selalu berjaga di pintu gerbang sehingga ketika ada siswa yang terlambat maka akan langsung diberikan poin. Setiap kertas poin yang didapatkan oleh siswa akan di kumpulkan oleh guru yang bersangkutan ke ruang kesiswaan, setelah dikumpulkan maka poin tersebut akan diinput oleh staf bagian kesiswaan yang terdiri dari tiga orang.

Berdasarkan dari hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi, dapat disimpulkan bahwa dalam tata aturan sistem poin pelanggaran setiap jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa akan diberikan poin, bobot poin yang diberikan tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan, penghargaan (reward) berupa penghapusan poin pelanggaran diberikan kepada siswa berprestasi, setiap kenaikan kelas atau tahun ajaran baru poin siswa kembali menjadi nol (0) atau direset, dan siswa dengan akumulasi poin 100 akan diberhentikan dari sekolah.

4) Prosedur Penanganan Sistem Poin Pelanggaran

- a. Jenis pelanggaran yang langsung mendapatkan bimbingan dan jenis pelanggaran yang hanya dicatat poinnya

Setiap jenis pelanggaran yang dilakukan siswa selain mendapatkan poin tentunya beberapa pelanggaran juga perlu untuk segera mendapatkan bimbingan Seperti yang dikatakan oleh AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja bahwa:

“pelanggaran yang langsung mendapat bimbingan khususnya dari kesiswaan dan BK ya tentunya pelanggaran yang berat misalnya saja berkelahi atau kedapatan merokok di sekolah, kemudia untuk pelanggaran yang tidak langsung mendapatkan bimbingan seperti terlambat, tidak memakai atribut yang lengkap atau tidak kerja tugas”. (2710/21_AS)

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh HK, selaku guru matematika di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan:

“yang langsung mendapatkan bimbingan yaitu apabila dia melakukan pelanggaran berat dengan poin yang tinggi contohnya apabila kedapatan menggunakan HP saat jam pelajaran tanpa seizin guru karena itu poinnya langsung 50, kemudian yang hanya dicatat dulu misalnya seperti terlambat, tapi setiap pelanggaran yang dilakukan siswa tentunya akan tetap mendapat teguran atau nasehat dari guru yang mendapatkan”. (29/10/21_KH)

Kemudian dipertegas oleh YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan:

“biasanya pelanggaran yang ringan-ringannya itu yang hanya dicatat poin, dalam artian tidak mendapatkan bimbingan setelah itu, nah kalau berkelahi atau membully temannya akan kita kenakan poin dan sekaligus mendapat bimbingan khususnya kami di BK tapi jarang-jarang terjadi yang kasus seperti itu kebanyakan kami tangani yang memang sudah cukup poin”. (27/10/21_YRP)

Berdasarkan beberapa pendapat informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tata tertib yang langsung mendapatkan bimbingan adalah pelanggaran dengan bobot poin yang tinggi. Sedangkan pelanggaran yang tidak langsung mendapat bimbingan atau hanya dicatat dulu poinnya adalah pelanggaran yang bobot poinnya tergolong rendah misalnya tidak mengerjakan tugas.

b. Penanganan siswa dengan akumulasi poin tinggi

Tabel 4. 2 Daftar pembinaan siswa sehubungan poin pelanggaran

No	PEMBINAAN	KELAS		
		X	XI	XII
1	Pembinaan Pertama (30 poin)	34	42	22
2	Pembinaan Kedua (50 poin)	19	17	12
3	Pembinaan Ketiga (75 poin)	3	3	0
4	Keluar (dropout)	1	1	0

Sumber: Data kesiswaan SMA Negeri 5 Tana Toraja TA 2019/2020

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, namun setelah dilakukan pembinaan oleh pihak sekolah pelanggaran tata tertib siswa mulai berangsur menurun.

Penanganan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran bukan hanya tanggung jawab kesiswaan dan guru BK (Bimbingan Konseling) saja, tetapi juga seluruh guru dan karyawan SMAN 5 Tana Toraja. Setiap siswa yang sering melanggar tata tertib akan dilakukan pembinaan dan pemanggilan orang tua ke

sekolah. Seperti yang dikemukakan AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan bahwa:

“untuk penanganan pelanggaran siswa sudah kita atur sedemikian rupa pada jumlah poin tertentu untuk dilakukan pembinaan, untuk pembinaannya, kesiswaan menyampaikan kepada wali kelas bahwa anak walinya ini jumlah poinnya sudah mencapai syarat pembimbingan untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan orang tua/wali, pemanggilan wali pertama dilakukan saat poin 30, pemanggilan kedua 50 dan pemanggilan ketiga poin 75, jadi setelah wali kelas memanggil orang tua maka wali kelas, kesiswaan dan BK berkolaborasi untuk melakukan pembinaan bersama dengan orang tua siswa di sekolah”. (27/10/21_AS)

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja bahwa:

“penanganan siswa yang poinnya sudah tergolong tinggi itu dilakukan tiga tahap pemanggilan wali, nanti dilakukan pemanggilan orang tua saat poinnya sudah 30 itu pemanggilan pertama, pemanggilan kedua di poin 50 kemudian ketiga di poin 75 keatas dan ketika poin sudah 100 selanjutnya wali siswa kita arahkan ke kepala sekolah sebagai pemegang keputusan. (27/10/21_YRP)

Kemudian ditambahkan juga oleh PT, selaku guru bimbingan konseling di

SMAN 5 Tana Toraja menyatakan:

“kita di BK jangankan saat pemanggilan orang tua sebelum pemanggilan pun jika wali kelasnya rasa untuk perlu diberikan pembinaan yah kita bimbing, meskipun mereka susah untuk berubah dalam jangka waktu singkat tapi kita tetap usahakan berikan motivasi dan arahan sehingga dia bisa berubah sehingga poinnya tidak terus bertambah”. (27/10/21_PT)

Kemudian dipertegas oleh HK, selaku guru matematika di SMAN 5 Tana

Toraja menyatakan bahwa:

“biasanya ada rekapan poin untuk wali kelas yang diberikan dari kesiswaan dan setiap kali kita mendapatkan anak wali kita melanggar itu biasa kita bimbing langsung misalnya dalam kelas atau saat kita mengajar di kelas dan bisa juga dengan BK dan jika poinnya sudah

mencapai batas pemanggilan maka ada pembimbingan bersama dengan orang tua di sekolah dan itu ada tiga kali pemanggilan”.

Berdasarkan beberapa pendapat informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang bobot poinnya sudah mencapai daftar pembinaan akan dilakukan pemanggilan orang tua ke sekolah. Pemanggilan pertama saat bobot poin 30, pemanggilan kedua 50, dan pemanggilan ketiga poin 75.

c. Bentuk penanganan pelanggaran yang terjadi di luar sekolah

Sistem poin pelanggaran berlaku di dalam maupun di luar sekolah, selama siswa tersebut masih berstatus siswa SMA Negeri 5 Tana Toraja maka pihak sekolah masih berhak memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran di luar lokasi sekolah. Seperti yang dikatakan oleh AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja bahwa:

“sesungguhnya tatib kami itu berlaku di dalam dan di luar sekolah, misalnya ada yang berkelahi di luar kemudia ditangkap oleh pihak berwajib yah kami ikut dalam hal pembinaan tapi kami tidak mencampuri dalam hal hukumnya, pokoknya selama masih berstatus menjadi siswa disini walaupun sudah tidak pakai atribut sekolah, kan masih membawa nama baik sekolah maka akan tetap di kenakan poin, namun dalam pemberian poin kami harus bijak melihat setiap kasus”.
(927/10/21_AS)

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja yang mengatakan: “pelanggaran yang terjadi di luar sekolah itu baik laporan dari masyarakat ataupun guru sendiri yang dapat tetap itu di proses di sekolah kalau itu mencoreng nama baik sekolah kita, tapi tidak serta merta dikasih poin, biasa juga hanya berupa pembimbingan”. (27/10/21_YRP)

Kemudian juga disampaikan oleh HK, selaku guru matematika di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan bahwa: “kalau terjadi pelanggaran diluar sekolah dan kita

mendapatkan laporan dari masyarakat atau dari pihak lain tetap kita lakukan pembinaan”. (29/10/21_HK)

Selanjutnya dipertegas oleh AN, selaku siswa kelas 12 di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan bahwa: “kalo kasus diluar masih di proses itu kayak misalnya berkelahi atau perempuan hamil duluan begitu kak otomatis kan pasti kena poin itu dan langsung keluar”. (1/11/21_AN)

Dari beberapa pendapat informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi di luar sekolah baik saat siswa masih memakai baju seragam sekolah maupun tidak tetap di proses oleh sekolah, selama itu dirasa dapat merusak nama baik sekolah. Namun dalam penanganannya tidak serta merta siswa tersebut langsung diberikan poin, tetapi pihak sekolah perlu mengkaji lebih jauh terhadap pelanggaran yang terjadi.

Selain data di atas, peneliti juga melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada tanggal 27 oktober – 2 November 2021. Pelanggaran tata tertib yang ringan seperti terlambat tidak akan langsung mendapatkan pembinaan namun hanya dicatat poinnya. Pembinaan siswa dengan akumulasi poin tinggi sudah terlaksana dengan baik, hal ini didukung dengan setiap harinya ada saja orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk melakukan pembinaan terkait pelanggaran anaknya, pembinaan ini dilakukan di ruangan BK yang dihadiri oleh wakasek bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling, wali kelas, orang tua dan siswa yang bersangkutan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa prosedur penanganan pelanggaran siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja sudah terlaksana dengan baik dimana pembinaan terhadap siswa dengan akumulasi poin tinggi dilakukan sebanyak tiga kali sekaligus dilakukan pemanggilan orang tua yang mana pembinaan pertama 35 poin, pembinaan kedua 50 poin, dan pembinaan ketiga 75 poin, hal ini agar orang tua bisa mengetahui perkembangan kedisiplinan anaknya. Pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa di luar lokasi sekolah akan tetap mendapat pembinaan dari sekolah baik itu didapat langsung oleh guru ataupun laporan dari masyarakat atau temannya.

5) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Sistem Poin

Setiap kebijakan yang dibuat tidak luput dari faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja yaitu:

a. Faktor penghambat

Dari pernyataan AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan:

“kendala yang kami temui itu kadang pelanggaran-pelanggaran dari siswa itu tidak diberi poin oleh guru jadi biasa hanya ditegur saja dan berikutnya adalah kadang ada saja pemanggilan orang tua itu tidak cepat direspon oleh orang tua siswa akhirnya yang kami lakukan adalah kunjungan ke rumahnya, faktor lain itu khususnya di bagian penginputan poin siswa karena staf kami di kesiswaan itu adalah guru jadi kadang mereka punya kesibukan lain juga sehingga sulit membagi waktunya sehingga biasanya rekapan poin siswa itu lambat dikerjakan, makanya terkadang sudah lebih poinnya baru ketahuan bahwa anak ini seharusnya sudah dapat bimbingan”. (27/10/21_AS)

Kemudian dikemukakan oleh YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan:

“kalau kendala yang saya temui khususnya di BK adalah siswa yang susah untuk dibina jadi poinnya selalu bertambah hingga akhirnya keluar, kemudian masalah kesadaran orang tua siswa kadang itu ada saja orang tua yang malas datang ke sekolah jadi kita susah untuk lakukan bimbingan bersama dengan orang tuanya, akhirnya biasa wali kelasnya yang kerumah”. (27/10/21_YRP)

Ditambahkan juga oleh PT, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja bahwa:

“mungkin yang jadi masalah adalah kita di BK dalam pembinaan harusnya membina siswa tersebut sampai dia berubah namun sistem poin yah punya aturan tersendiri sehingga kadangkala belum selesai dibina siswa tersebut sudah cukup poinnya karena melakukan pelanggaran lagi sehingga akhirnya keluar dan tidak semua siswa bisa berubah secara singkat, tapi ini sudah aturan sekolah jadi kita dari BK menyesuaikan saja, jadi memang sistem poin ini agak membatasi fungsi atau bertentangan dengan fungsi BK”. (27/10/21_PT)

Selanjutnya dipertegas juga oleh SP, selaku guru sejarah di SMAN 5 Tana Toraja yang mengatakan:

“kendala yang pertama dari siswa itu sendiri yang tidak mengindahkan dengan adanya sistem poin karena karakternya yang memang susah untuk di atur sehingga akhirnya keluar, kedua dari guru, ada diantara guru-guru yang tidak menjalankan sesuai aturan kadang menutup-nutupi mungkin karena anak walinya, mungkin juga karena keluarganya sehingga guru yang bersangkutan tidak memberikan poin”. (29/10/21_SP)

Berdasarkan beberapa pendapat informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan sistem poin di sekolah antara lain sebagian guru tidak menjalankan sesuai aturan, orang tua siswa yang sering mengabaikan surat panggilan dari sekolah, kurangnya SDM di kesiswaan, dan terhambatnya fungsi guru bimbingan konseling dalam hal pelaksanaan pembinaan.

b. Faktor pendukung

Dikemukakan oleh AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan:

“kalau dari faktor pendukungnya itu tentunya adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dalam mengawasi perilaku siswa-siswi kita, kemudian adanya dukungan yang baik dari orang tua siswa sehingga sistem poin ini masih terlaksana dengan baik sampai saat ini, dan mayoritas siswa sudah sadar dan menaati akan setiap aturan yang berlaku dalam sistem poin”. (27/10/21_AS)

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh HK, selaku guru matematika di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan: “yang pasti sebagai faktor pendukungnya tentunya karena adanya usaha/kerjasama yang baik dari pihak sekolah dalam menjalankan sistem poin ini, kemudian sebagian besar siswa kita sudah menaati setiap tata tertib yang ada di sekolah”. Kemudian dipertegas oleh SP, selaku guru sejarah di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan: “seperti yang saya katakan tadi bahwa orang tua sangat mendukung dengan adanya sistem poin ini, jadi adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah dan wali siswa, saya rasa itulah yang menjadi pendukung dari poin ini”. (29/10/21_SP)

Dari beberapa pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem poin yaitu terkadang ada saja guru yang malas memberikan poin, orang tua siswa yang kurang cepat merespon surat pemanggilan, dan masih ada sebagian siswa yang sulit untuk dibina. Selanjutnya kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus menangani tata tertib siswa menjadi salah satu kendala dalam menjalankan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem

poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja adalah adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah dan terutama dengan orang tua siswa dan kesadaran dari siswa untuk menaati peraturan yang ada.

Selain data di atas peneliti juga melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada pada Tanggal 27 oktober – 2 November 2021. Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem poin yaitu masih ada beberapa guru yang tidak memberikan poin kepada siswa yang melanggar tata tertib dan orang tua siswa yang kadang lambat merespon surat pemanggilan dari sekolah sehingga kadang satu atau dua minggu baru hadir di sekolah untuk melakukan pembinaan bersama guru di sekolah. Faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem poin yaitu kinerja yang baik dari pihak kesiswaan dalam mengelola poin pelanggaran siswa dimana ketiga staf di kesiswaan yang menginput poin terdiri dari guru yang ditengah kesibukannya mengajar masih menyempatkan diri untuk menginput poin pelanggaran siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja di antaranya kurangnya SDM pada bagian kesiswaan sehingga penginputan poin siswa sering terkendala dan beberapa orang tua siswa lambat dalam merespon surat pemanggilan dari sekolah terkait pembinaan siswa dengan akumulasi poin tinggi sehingga pembinaan siswa lambat dilakukan. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem poin yaitu adanya kerjasama yang baik dari pihak sekolah dalam mengawasi setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa.

b. Dampak Penerapan Sistem Poin Pelanggaran

- 1) Dampak sistem poin dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Negeri 5 Tana Toraja

Penerapan tata tertib di sekolah diharapkan mampu menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Penerapan sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa baik di lokasi sekolah maupun di luar sekolah. Seperti yang dikatakan oleh AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan:

“memang sistem poin ini di SMA 5 sangat akurat untuk meredam kenakalan siswa, makanya sampai saat ini kita masih mempertahankan sistem poin ini karena tidak mungkin kita mempertahankan sesuatu kalau itu tidak memberikan dampak yang baik. Kalau disini mungkin karena sistem poinnya itu sungguh membuat anak untuk ngerem itu berbagai model-model untuk mencari masalah yang bisa dilihat sebagai sebuah pelanggaran dan juga disini jarang-jarang itu terjadi kenakalan remaja khususnya berkelahi, mungkin di sekolah lain kasus ini sering terjadi tapi disini karena adanya sistem poin sehingga siswa tidak berani untuk melakukan itu karena jika berkelahi sudah pasti di keluarkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa siswa yang sering melanggar tapi itu hanya sebagian kecil saja”. (27/10/21_AS)

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh HK, selaku guru matematika di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan:

“Sangat efektif, awalnya mungkin mereka merasa sulit untuk mengikuti namun lama kelamaan mereka akan terbiasa dengan sistem poin, contohnya pelanggaran yang sering terjadi misalnya keterlambatan setelah dia mendapatkan poin hari ini biasanya keesokan harinya dia akan datang lebih cepat agar tidak dapat poin lagi, contoh lainnya anak-anak lebih rajin membawa buku paket dan mengerjakan tugas karena kalau tidak akan diberikan poin oleh guru yang masuk mengajar”. (29/10/21_HK)

Dikemukakan juga oleh PT, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana Toraja yang menyatakan:

“secara kasat mata memang cukup meningkatkan kedisiplinan cuma yang jadi masalahnya apakah anak memang berubah dari dalam dirinya sendiri atau tidak. Contoh bahwa sistem poin cukup meningkatkan kedisiplinan misalnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan ada tercantum dalam sistem poin yah pasti mereka hindari jadi secara otomatis sistem poin juga cukup membantu, kenapa cukup membantu karena kalau misalnya kita tidak pakai sistem poin dan semua guru serta pegawai tidak sadar akan kedisiplinan dan itu hanya diberatkan kepada BK saja saya kira tidak akan efektif dan tidak akan mampu menangani sekian banyak siswa dengan satu dua orang BK untuk membina, jadi sistem poin ini cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa”.

Selanjutnya disampaikan oleh AN, selaku siswa kelas 12 di SMAN 5 Tana

Toraja yang menyatakan:

“kalau menurut saya kak sistem poin di sekolah itu bagus di adakan karena itu membuat siswa kek disiplin begitu, baru kan kalo ada poin kayak berbeda dengan sekolah lain dan menurut saya berdampak sekali dengan kedisiplinan siswa karena misalnya tanpa sistem poin itu kek misalnya terlambat pasti merasa tidak adaji apa yang akan merugikan tapi kalo ada poin pasti akan menyesuaikan. untuk hukumannya kalo saya itu kak jera karena kalo misalnya semakin dipupuk itu poin kita sudah susah masuk disekolah ini terus keluar itu kita rugi sekali kak “.
(1/11/21_AN)

Kemudian dipertegas oleh EP, selaku siswa kelas 12 di SMAN 5 Tana Toraja menyatakan: “menurutku iya berdampak, karena kan kalo dipoinki toh kalo semakin banyak poin bisaki keluar jadi kalo ada poin takutki biasa melanggar lagi itu. Untuk sanksi hukumannya lumayan jera ki kalo dapat poin kak tapi biasa masih di ulangi lagi karena maumi di apa kalo terlambat ki”. (2/11/21_EP)

Dari beberapa pedapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa sitem poin pelanggaran cukup berdampak baik dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian kecil siswa yang sering melanggar namun tidak sampai berujung pada pemberhentian dari sekolah (DO).

2) Tingkat kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah sistem poin diterapkan di SMA Negeri 5 Tana Toraja

Dikemukakan oleh YRP, selaku guru bimbingan konseling di SMAN 5 Tana

Toraja yang menyatakan:

“sebelum ini poin diterapkan di SMA 5 luar biasa sekali itu yang namanya pelanggaran siswa misalnya saja bolos, alpa, apalagi kalau terlambat, dulu kalau sudah mau masuk jam sekolah biasanya itu guru turun dulu ke lorong untuk mengejar ini anak-anak baru mereka berlarian masuk ke sekolah bahkan dulu guru sering menemukan siswa yang merokok di toilet. tapi sekarang sudah ada sistem poin kalau mereka sengaja untuk terlambat atau melanggar tata tertib berarti mereka sendiri yang menghukum dirinya dengan mendapat poin, jadi selama pelaksanaan sistem poin sudah tidak pernah ditemukan siswa kita yang merokok di lokasi sekolah apalagi bolos”. (27/10/21_YRP)

Kemudian juga disampaikan oleh SP, selaku guru sejarah di SMAN 5 Tana

Toraja menyatakan:

“jadi sebelum sistem poin diterapkan, ada anak-anak yang memang susah dibina dan tetap berada di sekolah sehingga mempengaruhi teman-temannya karena kita juga sulit mencari sanksi yang tepat untuk membinanya. Setelah diberlakukan poin pelanggaran anak-anak yang susah dibina semakin berubah dan sadar bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat membuatnya keluar dari sekolah, Contohnya pelanggaran terlambat jadi dulu banyak yang terlambat setelah ada poin sudah jarang yang terlambat kemudian dalam hal proses pembelajaran sudah sangat tertib”. (29/10/21_SP)

Selanjutnya dipertegas oleh AS, selaku wakasek bidang kesiswaan di SMAN

5 Tana Toraja yang menyatakan;

“sebelum pemberlakuan sistem poin memang begitu banyak pelanggaran jadi bermacam-macam pelanggaran yang dilakukan siswa. Tetapi setelah ada sistem poin yakin bahwa itu bisa meredam karena akan selalu dipikirkan oleh siswa bahwa ini kita akan diberi poin jika melanggar sehingga kedepannya dia bisa lebih mendisiplinkan dirinya”. (27/10/21_AS).

Dari beberapa pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa efek sebelum dan sesudah penerapan sistem poin sangat mempengaruhi kedisiplinan siswa. Dimana sebelum penerapan sistem poin begitu banyak jenis pelanggaran yang dilakukan siswa, namun setelah penerapan sistem poin kasus pelanggaran siswa dapat ditekan.

Selain dari data wawancara, peneliti juga melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada Tanggal 27 Oktober – 2 November 2021. Penerapan sistem poin cukup berdampak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dimana semenjak penerapan sistem poin sudah tidak ada siswa yang kedapatan bolos sekolah hal ini juga didukung karena pagar sekolah yang tinggi sehingga tidak mungkin dipanjat oleh siswa. Kemudian sudah tidak ada siswa yang kedapatan merokok di sekolah dikarenakan setiap kelas dan sudut sekolah dipasang cctv yang langsung terhubung pada layar monitor di ruang kepala sekolah sehingga setiap aktivitas siswa akan diawasi. Namun masih banyak siswa yang sering terlambat, setiap harinya ada saja siswa yang mendapat poin karena terlambat hal ini dimungkinkan karena sebagian besar siswa datang ke sekolah menggunakan angkutan umum sedangkan penumpang pada angkutan umum semenjak pandemic covid-19 dibatasi, sehingga siswa kesulitan mencari angkutan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem poin pelanggaran dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap kedisiplinan siswa, terdapat perbedaan tingkat kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah penerapan sistem poin dimana setelah diterapkan, pelanggaran tata tertib sudah jarang dilakukan oleh siswa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

sistem poin pelanggaran cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, dikatakan cukup karena masih ada sebagian kecil siswa yang sering melanggar tata tertib sekolah.

B. PEMBAHASAN

Dalam uraian berikut akan dipaparkan pembahasan hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti secara deskripsi. Terungkap bahwa penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Negeri 5 Tana Toraja, yang meliputi latar belakang penerapan, pihak pelaksana, tata aturan, prosedur penanganan, kendala dalam pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kedisiplinan siswa sebagai berikut.

1. Gambaran Penerapan Sistem Poin

a. Latar Belakang Penerapan Sistem Poin Pelanggaran

Sistem poin merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin siswa, sistem ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan sanksi yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Sistem poin pelanggaran pertama kali di terapkan di SMA Negeri 5 Tana Toraja pada tahun Ajaran 2008/2009. Latar belakang penerapannya guna untuk mengurangi tingkat pelanggaran siswa dan mempermudah penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

Dengan adanya tata tertib itu diharapkan untuk bisa menjamin kehidupan yang tertib dan tenang, sehingga kelangsungan hidup sosial dapat dicapai. Dalam

Permendiknas RI No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah, bagian B nomor 9 mengatur pedoman pelaksanaan tata tertib dalam poin c sebagai berikut:

“sekolah/madrasah menetapkan pedoman tata tertib yang berisi: 1) tata tertib pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; 2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di sekolah/madrasah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib”.

Penerapan sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja, pada dasarnya sudah menagacu pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Permendiknas RI No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan dasar dan menengah, termasuk seluruh aturan yang di persyaratkan di dalamnya, yaitu adanya petunjuk, peringatan dan larangan dalam berperilaku, serta adanya pemberian sanksi bagi yang melanggar tata tertib.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat dapat disimpulkan bahwa latar belakang diterapkannya sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja dimaksudkan untuk menekan pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Maka secara tidak langsung sistem poin yang diterapkan sekolah akan membawa siswa kedalam kondisi yang baik dan teratur dalam proses belajar mengajar, karena berisikan larangan yang harus ditaati oleh siswa, dan berfungsi sebagai pengendali bagi perilaku siswa.

b. Pihak Pelaksana Sistem Poin Pelanggaran

Pihak pelaksana dalam sistem poin merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian yang baik, ini dilakukan karena bertujuan untuk mewujudkan tugas tiap bidang, wewenang, dan tanggung jawab menjadi lebih jelas. Menurut Susanto (2015) personel sistem poin mempunyai kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan sistem poin dan mempunyai garis koordinasi satu dengan yang lain sehingga dalam penerapannya kepada siswa akan terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar komponen pelaksana.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja pada dasarnya sudah dilakukan pembagian tugas dan fungsinya pada masing-masing komponen pelaksana. Prosedur pelaksanaannya sendiri sudah dijalankan oleh pihak pelaksana dengan baik, akan tetapi tidak semua pihak menjalankan aturan sebagaimana mestinya.

c. Tata Aturan Sistem Poin Pelanggaran SMA Negeri 5 Tana Toraja

Dalam pelaksanaan sistem poin setiap sekolah memiliki mekanisme masing-masing sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Ahmadi (2017) sebuah peraturan akan berjalan dengan lancar, tidak terlepas dari dua hal yaitu, 1) hukuman atau sanksi; 2) penghargaan atau reward, dua hal ini tentunya akan dapat dilakukan melalui sistem poin pelanggaran. Sistem poin diberlakukan dalam tata tertib sekolah, masing-masing peraturan diberikan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecil dan besarnya pelanggaran.

Menurut Taqiyya (2013) Setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib diberikan skor poin pelanggaran oleh guru dengan menulis nama, kelas, jenis pelanggaran dan jumlah poin pada kertas poin, kemudian kertas poin tersebut diserahkan ke bagian kesiswaan untuk di rekapitulasi ke dalam buku poin pelanggaran siswa. Dalam sistem poin setiap akumulasi poin yang dikumpulkan memiliki sanksinya masing-masing dan juga terdapat penghargaan (reward) kepada siswa yang berprestasi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa, tata aturan dalam sistem poin pelanggaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 5 Tana Toraja sudah mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Ahmadi (2017) dan Taqiyya (2013) dimana tata aturannya sudah dilaksanakan dengan baik mulai dari jumlah poin tiap pelanggaran, sanksi atau hukuman dari jumlah poin yang di dapatkan, dan reward atau penghargaan yang diberikan kepada siswa berupa pengurangan jumlah poin.

d. Prosedur Penanganan Sistem Poin Pelanggara

- a) Jenis pelanggaran yang langsung mendapatkan bimbingan dan jenis pelanggaran yang hanya dicatat poinnya.

Menurut Tu'u (2004) dengan adanya sanksi hukuman di sekolah siswa akan merasa takut untuk melanggar aturan yang ada, maka dari itu bentuk hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Hukuman diharapkan mempunyai nilai pendidikan, artinya siswa menyadari bahwa perbuatannya yang salah akan membawa akibat buruk dan harus ditanggung oleh dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa setiap jenis pelanggaran yang dilakukan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja akan mendapatkan poin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Jenis pelanggaran yang langsung mendapatkan bimbingan adalah pelanggaran yang bobot poinnya tinggi misalnya berkelahi dan merokok, pelanggaran yang tidak langsung mendapatkan bimbingan adalah pelanggaran yang bobot poinnya kecil misalnya tidak memakai atribut sekolah yang lengkap.

b) Penanganan siswa dengan akumulasi poin tinggi

Dalam pelaksanaan sistem poin mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan kartu kuning (peringatan) yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Menurut Hidayani (2013) setiap poin pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa dikumpulkan sampai batas tertentu, jika poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa telah mencapai batas maksimal, maka kartu kuning tadi (peringatan) dapat berubah menjadi kartu merah sebagai isyarat bahwa siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penanganan terhadap siswa yang akumulasi poinnya tinggi sudah dilakukan sesuai dengan tata aturan dalam sistem poin, dimana penanganan dilakukan melalui tiga tahap yaitu pembinaan pertama 30 poin, pembinaan kedua 50 poin, dan pembinaan ketiga 75 poin. Peringatan tersebut

diberikan sekaligus dilakukan pemanggilan orang tua siswa ke sekolah untuk dilakukan pembinaan bersama terkait pelanggaran siswa yang bersangkutan.

c) Bentuk penanganan pelanggaran yang terjadi di luar sekolah

Menurut Taqiyya (2013) bahwa siswa dapat diberi poin pelanggaran apabila dia melanggar tata tertib sekolah selama mereka:

- 1) Berada dalam lingkungan sekolah, baik ketika sedang belajar, waktu istirahat, waktu ibadah, atau berada di kantin sekolah.
- 2) Berada di lingkungan sekolah di luar jam belajar resmi, termasuk pada kegiatan les (pengayaan) di sore hari atau pada kegiatan ekstrakurikuler yang ditentukan sekolah.
- 3) Memakai pakaian seragam sekolah, termasuk dalam perjalanan, baik ketika pergi sekolah maupun dalam perjalanan sepulang dari sekolah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sistem poin pelanggaran yang diterapkan di SMA Negeri 5 Tana Toraja berlaku baik di sekolah maupun di luar sekolah, selama siswa tersebut masih berstatus sebagai siswa SMA Negeri 5 Tana Toraja, maka pihak sekolah tetap melakukan pembinaan. Namun dalam penanganannya tidak serta merta siswa tersebut langsung diberikan poin, tetapi pihak sekolah perlu mengkaji lebih jauh terhadap pelanggaran yang terjadi.

e. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Sistem Poin

Setiap tata tertib yang diberlakukan sekolah diharapkan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan nyaman sehingga proses

belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Penerapan sistem poin pelanggaran di SMA 5 Tana Toraja tidak luput dari faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem poin yaitu masih ada beberapa guru yang tidak memberikan poin ketika siswa melanggar tata tertib, orang tua siswa yang kurang cepat merespon surat pemanggilan, dan masih ada sebagian siswa yang sulit untuk dibina, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang secara khusus menangani pengelolaan poin pelanggaran siswa menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaannya. Sedangkan faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja adalah adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah dan terutama dengan orang tua siswa dalam membina siswa yang sering melanggar tata tertib.

2. Dampak Penerapan Sistem Poin Pelanggaran

- a. Dampak sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja

Kedisiplinan merupakan salah satu faktor penunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Untuk menciptakan sekolah yang berkualitas diperlukan iklim sekolah yang kondusif. Salah satu iklim yang memungkinkan berlangsungnya suatu proses pendidikan berjalan dengan efektif sebagaimana yang diharapkan semua pihak adalah dengan tegaknya disiplin sekolah. Keberadaan

sistem poin dalam tata tertib memegang peranan yang sangat penting yaitu sebagai alat untuk mengatur perilaku atau sikap siswa di sekolah agar lebih disiplin.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem poin pelanggaran cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, dimana pelanggaran tata tertib siswa bisa di minimalisir dikarenakan adanya sanksi poin. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian kecil siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib, hal ini dikarenakan karakter dari siswa tersebut yang sulit untuk dibina.

b. Perbedaan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah penerapan sistem poin

Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif maka pihak sekolah membuat peraturan sekolah yang diterapkan bagi semua warga sekolah. Peraturan sekolah yang di implementasikan dengan baik dapat memberi pengaruh bagi terciptanya sekolah sebagai lingkungan pendidikan yang kondusif bagi kegiatan pembelajaran. Sistem poin pelanggaran yang diberlakukan kepada siswa dapat memotivasi siswa untuk berperilaku sesuai aturan sekolah.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa sebelum diterapkannya sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja pelanggaran tata tertib sangat marak dilakukan siswa. Setelah penerapan sistem poin tingkat kedisiplinan siswa sudah berangsur membaik, dimana sudah tidak ditemukannya siswa yang sering bolos dan merokok di lokasi sekolah, hal ini membuktinya bahwa penerapan sistem poin di sekolah cukup efektif dan berdampak baik terhadap kedisiplinan siswa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem poin dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA Negeri 5 Tana Toraja cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dan dapat dilihat dari:

1. Penerapan sistem poin di SMA Negeri 5 Tana Toraja dimulai sejak tahun ajaran 2008/2009. Latar belakang diterapkannya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dan agar penanganan terhadap pelanggaran tata tertib bisa dilakukan secara adil, pelaksanaan sistem poin merupakan tanggung jawab semua guru, setiap jenis pelanggaran memiliki bobot poin tertentu dan siswa yang akumulasi poinnya sudah mencapai 100 akan di berhentikan dari sekolah, penanganan terhadap pelanggaran tata tertib dilakukan bila akumulasi poin siswa sudah mencapai 30 poin untuk pembinaan pertama, 50 poin untuk pembinaan kedua, dan 75 poin untuk pembinaan ketiga. Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem poin antara lain, pemanggilan orang tua/wali siswa yang kadang lambat direspon, dan pengelolaan poin pelanggaran siswa yang kurang efisien dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas pada bagian kesiswaan, sedangkan faktor pendukung yaitu adanya kersajama yang baik antar pihak sekolah dalam membina dan mengawasi pelanggaran tata tertib siswa.

2. Dampak penerapan sistem poin pelanggaran di SMA Negeri 5 Tana Toraja sudah cukup efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa, dengan adanya sistem poin kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa dapat berkurang sehingga berdampak terhadap kedisiplinan siswa yang semakin meningkat khususnya dalam disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan berperilaku. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada sebagian kecil siswa yang sering melakukan pelanggaran tata tertib.

B. SARAN

1. Bagi Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebaiknya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan sistem poin yang telah berjalan agar dapat berjalan dengan baik dan setiap warga sekolah melaksanakan sistem poin sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Bagi Guru Bimbingan Konseling

Guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat berperan aktif dalam mencari metode pembinaan yang sesuai dengan aturan dalam sistem poin pelanggaran agar proses pembinaan siswa dapat berjalan secara baik.

3. Bagi Guru Mata Pelajaran

Hendaknya para guru memberikan peringatan atau sanksi kepada siswa yang telah melanggar tata tertib sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu dengan memberikan poin yang sesuai atas pelanggaran yang telah siswa lakukan.

4. Bagi Siswa

Hendaknya meningkatkan kesadaran untuk mentaati peraturan yang berlaku di sekolah karena peraturan dibuat bukan hanya untuk membatasi siswa tetapi juga untuk membentuk karakter siswa.

5. Bagi Peneliti

Kajian ini bisa menjadi kajian lanjutan untuk lebih mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai penerapan sistem poin pelanggaran di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariananda, E. S., Hasan, S., & Rakhman, M. 2016. Pengaruh Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Teknik Pendingin. *Journal Of Mechanical Engineering Education*, 1 (2), 233.
- Ahmadi, R. 2017. Asas Dan Filsafat Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Darosy, E. 2011. Peran keluarga dalam membangun karakter anak. *Journal Psikologi*. Vol. 10 (2): 144-152.
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fachrudin, S. I. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Malang: FIB IKIP Malang.
- Fitriyani Nur. 2016. Hubungan Persepsi Siswa Tentang Penerapan Sistem Poin (Reward & Punishment) Dan Disiplin Siswa Mts Annajah, Petungkang Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 168–169.
- Firdaus, M. R. 2015. *Efektifitas penerapan poin pelanggaran dalam mengurangi tingkat pelanggaran santri pada ponpes Al Mizan Muhammadiyah Lamongan. Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Gunarsah, S. D. 2012. *Psikologi Untuk Keluarga*. Jakarta: Penerbit Libri.
- Gurupkn.com. 2015. *Fungsi tata tertib sekolah bagi siswa*. (Diakses pada 10 Januari 2021, pukul 20:00 WITA).
- Hurlock, Elizabet. B. 1990. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Dalam Suatu Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Hamid, Abdulloh. 2017. *Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren*. Surabaya: Intiyaz.
- Hadianti, L. S. 2008. Pengaruh pelaksanaan tata tertib sekolah terhadap kedisiplinan belajar siswa (*Penelitian Deskriptif Analisis di SDN Sukakarya II Kecamatan samarang Kabupaten Garut*). *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 02(1), 1–8.
- Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen Personalian Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Perkasa.
- Hamidah, M. 2018. Upaya Guru Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa SMK Muhammadiyah Parakan Tangerang Selatan. *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Jakarta*.

- Hidayati, N. 2013. Peningkatan Kerapaaian Dalam Berpakaian Siswa Dengan Menggunakan Kartu Disiplin. *Journal Skripsi*.
- Imron, A. 2012. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrakusuma, A, D. 1973. *Pengantar ilmu Pengetahuan*. Malang: FIP Malang.
- Karana, P. L. 2015. Contribution Of Negative Reinforcement Points System To Affective Discipline In III B Grade Students At SD Negeri Golo Yogyakarta. *Journal pendidikan guru sekolah dasar* (7).
- Langgulun, H. 1986. *Manusia dan pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al Husna.
- Maharani, L., & Mustika, M. 2016. Hubungan Self Awareness dengan Kedisiplinan Peserta Didik Kelas VIII di SMP Wiyatama Bandar Lampung (*Penelitian Korelasional Bidang BK Pribadi*). *Jurnal pendidikan* 03(1), 57–72.
- Moleong, Lexi. J. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2012. *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Masruroh, D. 2012. Upaya Peningkatan Kedisiplinan Masuk Kegiatan Belajar Mengajar Melalui Layanan Konseling Individu Pada Siswa Kelas VII H SMP Negeri 4 Surakarta Semester Satu Tahun 2011/2012. *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, 0(1), 1–11.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analisis, A Methods Sourcebook* (R. R. Tjetjep (ed.); 3rd ed.). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Prijodarmito, S. 2004. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Purwanto, A. 2008. Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa MTsN Ngeplak, Sleman, Yogyakarta. *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Rachman, A. A., 1999. *Psikologi pendidikan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Rodhiyah, C. Q., Ali, A. R., & Hazin, M. 2018. Implementasi Kebijakan Sekolah Tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa Dalam Membentuk Perilaku Siswa Yang Berkarakter Di Sma Negeri 7 Kediri. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, 1 (3), 10–16.
- Soelaeman, M. 1985. *Menjadi Guru (suatu pengantar ke dunia guru)*. Bandung: Diponegoro.
- Soegeng, P. 1994. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Susanto, E. 2015. Manajemen Sistem Poin Dalam Membina Kedisiplinan Siswa. *Journal Manajemen Pendidikan*, 09, 372–373.

- Slameto. 1988. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan* (A. Nuryanto (ed.); 3rd ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sabri, A. 2005. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Susana, T. 2007. *Mempertimbangkan Hukuman Pada Anak*. Yogyakarta: Kanisius.
- Schaefer, C. 1996. *Cara Efektif Mendidik Dan Mendisiplinkan Anak* (T. Sirait (ed.)). Jakarta: Mitra Utama.
- Soedjono, D. 1984. *Sejarah Dan Asas-Asas Pemasarakatan*. Bandung: Amrico.
- Tu'u, T. 2004. *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. Jakarta: Grasindo.
- Tjalla, A., & Tain, S. 2004. *10 kesalahan orang tua & guru dalam mendidik & solusinya*. Bogor: An-Najah Press.
- Taqiyya, U. I. 2013. Implementasi kebijakan penerapan sistem poin dalam mengurangi tingkat pelanggaran siswa pada SMAN 1 Jekulo kudus. *Skripsi Universitas Negeri Malang*.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- Unaradjan, D. 2003. *Manajemen Disiplin*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Widodo, B. 2009. Keefektivan Konseling Kelompok Realitas Untuk Meningkatkan Perilaku Disiplin Siswa di Sekolah. *Tesis. Progam Studi Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

KISI-KIS INSTRUMEN PENELITIAN

**PENERAPAN SISTEM POIN PELANGGARAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA DI SMA NEGERI
5 TANA TORAJA**

Fokus	Dimensi	Deskripsi Fokus	Sumber Data	Metode
Penerapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar Belakang Penerapan 2. Pihak Pelaksana (SDM) 3. Tata Aturan 4. Prosedur Penanganan 5. Kendala Dalam Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang penerapan 2. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem poin 3. Kesadaran para guru dalam pelaksanaan sistem poin 4. Bobot poin pada setiap pelanggaran tata tertib 5. Sanksi dan reward dalam sistem poin 6. Pelanggaran yang langsung mendapat pembinaan dan yang hanya dicatat poinnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakasek Bidang Kesiswaan 2. Guru Bimbingan Konseling 3. Wali Kelas 4. Siswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi 2. Wawancara 3. Dokumentasi

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Penanganan siswa dengan akumulasi poin tinggi 8. Penanganan pelanggaran diluar sekolah 9. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sistem poin. 		
Dampak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dampak Sistem Poin Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dampak sistem poin terhadap tingkat kedisiplinan siswa 2. Perbedaan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah diterapkan sistem poin 		

Lampiran 2. Draft pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa
di SMA Negeri 5 Tana Toraja

(Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA Negeri 5 Tana Toraja)

Identitas informan

Nama Informan :

Hari/Tanggal wawancara :

Item pertanyaan

Penerapan

1. Bagaimana latar belakang diterapkannya sistem poin di SMAN 5 Tana Toraja?
 - a. Kapan sistem poin diterapkan dan siapa yang pertama kali mencetuskan sistem poin?
2. Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem poin di sekolah (SDM)?
 - a. Bagaimana peran/tugas bidang kesiswaan?
 - b. Bagaimana kesadaran para guru dalam pelaksanaan sistem poin?
3. Bagaimana tata aturan sistem poin pelanggaran di sekolah?
 - a. Bagaimana alur pencatatan poin siswa?
4. Bagaimana prosedur penanganan terhadap siswa yang mendapatkan poin?
 - a. Jenis pelanggaran apa yang langsung mendapatkan bimbingan dan pelanggaran apa yang hanya dicatat poinnya?
 - b. Bagaimana penanganan terhadap siswa dengan akumulasi poin yang tergolong tinggi?
 - c. Bagaimana bentuk penanganan kasus yang terjadi di luar sekolah?
 - Apakah siswa yang kedapatan melakukan perilaku menyimpang diluar sekolah masih dikenakan poin?

- d. Bagaimana penanganan pelanggaran siswa yang tidak tercantum dalam sistem poin?
5. Kendala apa saja yang bapak/ibu temui dalam menjalankan kebijakan ini (faktor pendukung dan penghambat) ?

Dampak

1. Dampak sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa
 - a. Apakah sistem poin cukup berdampak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa?
 - Bagaimana wujud/ccontoh sehingga sistem poin dikatakan efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa?
2. Bagaimana efek sebelum dan sesudah sistem poin diterapkan di sekolah?
3. Pelanggaran tatib apa yang masih sering dilanggar siswa?

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di
SMA Negeri 5 di Kabupaten Tana Toraja

(Guru bimbingan konseling SMA Negeri 5 Tana Toraja)

Identitas informan

Nama Informan :

Hari/Tanggal wawancara :

Item pertanyaan

Penerapan

1. Bagaimana latar belakang diterapkannya sistem poin di SMAN 5 Tana Toraja?
 - a. Kapan sistem poin diterapkan dan siapa yang pertama kali mencetuskan sistem poin?
2. Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem poin di sekolah (SDM)?
 - a. Bagaimana peran / fungsi khusus guru bimbingan konseling dalam pembinaan siswa terkait pelanggaran siswa dalam sistem poin?
 - b. Bagaimana kesadaran para guru dalam pelaksanaan sistem poin?
3. Bagaimana tata aturan sistem poin pelanggaran di sekolah?
 - a. Bagaimana alur pencatatan poin siswa?
4. Bagaimana prosedur penanganan terhadap siswa yang mendapatkan poin
 - a. Jenis pelanggaran apa yang langsung mendapatkan bimbingan dan pelanggaran apa yang hanya dicatat poinnya?
 - b. Bagaimana penanganan terhadap siswa dengan akumulasi poin yang tergolong tinggi?
 - c. Bagaimana bentuk penanganan kasus yang terjadi di luar sekolah?
 - Apakah siswa yang kedapatan melakukan perilaku menyimpang diluar sekolah masih dikenakan poin?
 - d. Bagaimana penanganan pelanggaran siswa yang tidak tercantum dalam sistem poin?

5. Kendala apa saja yang bapak/ibu temui dalam menjalankan kebijakan ini (faktor pendukung dan penghambat) ?

Dampak

1. Dampak sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa
 - Apakah sistem poin cukup berdampak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa?
 - Bagaimana wujud/ccontoh sehingga sistem poin dikatakan efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa?
2. Bagaimana efek sebelum dan sesudah sistem poin diterapkan di sekolah?
3. Pelanggaran tatib apa yang masih sering dilanggar siswa?

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA
Negeri 5 di Kabupaten Tana Toraja

(Guru/wali kelas SMA Negeri 5 Tana Toraja)

Identitas informan

Nama Informan :

Hari/Tanggal wawancara :

Item pertanyaan

Penerapan

1. Bagaimana latar belakang diterapkannya sistem poin di SMAN 5 Tana Toraja?
 - a. Kapan sistem poin diterapkan dan siapa yang pertama kali mencetuskan sistem poin?
2. Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem poin di sekolah (SDM)?
 - a. Bagaimana peran/tugas wali kelas?
 - b. Bagaimana kesadaran para guru dalam pelaksanaan sistem poin?
3. Bagaimana tata aturan sistem poin pelanggaran di sekolah?
 - a. Bagaimana alur pencatatan poin siswa?
4. Bagaimana prosedur penanganan terhadap siswa yang mendapatkan poin?
 - a. Jenis pelanggaran apa yang langsung mendapatkan bimbingan dan pelanggaran apa yang hanya dicatat poinnya?
 - b. Bagaimana penanganan terhadap siswa dengan akumulasi poin yang tergolong tinggi?
 - c. Bagaimana bentuk penanganan kasus yang terjadi di luar sekolah?
 - Apakah siswa yang kedapatan melakukan perilaku menyimpang diluar sekolah masih dikenakan poin?
 - d. Bagaimana penanganan pelanggaran siswa yang tidak tercantum dalam sistem poin?
5. Kendala apa saja yang bapak/ibu temui dalam menjalankan kebijakan ini (faktor pendukung dan penghambat) ?

Dampak

1. Dampak sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa
 - a. Apakah sistem poin cukup berdampak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa?
 - Bagaimana wujud/ccontoh sehingga sistem poin dikatakan efektif dalam meningkatkan kedisiplinan siswa?
2. Bagaimana efek/perbedaan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah sistem poin diterapkan di sekolah?
3. Pelanggaran tatib apa yang masih sering dilanggar siswa?

PEDOMAN WAWANCARA

Penerapan sistem poin pelanggaran dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SMA

Negeri 5 di Kabupaten Tana Toraja

(Siswa SMA Negeri 5 Tana Toraja)

Identitas informan

Nama Informan :

Hari/Tanggal wawancara :

Item pertanyaan

1. Pelanggaran tata tertib siswa
 - Tata tertib seperti apa yang pernah dilanggar?
 - Siapa yang menindaki anda?
 - Apa yang menjadi penyebab sehingga anda sering melanggar tata tertib?
 - Apakah anda pernah kedapatan melakukan pelanggaran namun tidak diberikan poin?
2. Apakah anda hanya mendapatkan poin atau masih ada hukuman lain?
 - Apakah jera dengan hukuman yang didapatkan atau bagaimana?
 - Apakah pernah mendapatkan surat pemanggilan orang tua?
3. Bagaimana dengan penanganan kasus pelanggaran yang terjadi diluar sekolah?

Apakah menurut anda kebijakan ini cukup berdampak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa? alasannya?

Lampiran 3. Matriks Analisis Data

Matriks Analisis Data
Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan
Siswa di SMA Negeri 5 Tana Toraja

KET: F= Fokus

D= Dimensi

d= Deskriptor

P= Pertanyaan

Fokus	Dimensi	Hasil Wawancara	Catatan Observasi	Dokumentasi Dan Teori Yang Mendukung
Penerapan	Latar Belakang Penerapan	AS (F1,D1,d1,P1) “sistem poin diterapkan tahun ajaran 2008/2009, yang pertama kali mencetuska itu adalah kesiswaan dan BK, dan disetujui oleh kepala sekolah. Dengan melihat pada saat itu maraknya siswa yang melakukan	Peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan selama peneliti berada di lokasi penelitian pada 27 oktober – 2 November 2021 . Sebagai salah satu sekolah favorit di	Adapun teori yang mendukung penelitian ini dijelaskan dalam (Fitriwati et al., 2015) Sistem poin merupakan suatu alternatif yang dapat diberlakukan di sekolah sebagai upaya untuk menegakkan disiplin, sistem ini mengharuskan agar setiap pelanggaran tata tertib

		<p>pelanggaran tata tertib, dan jenis pelanggaran itu bervariasi. Jadi bagaimana sehingga pembinaan siswa yang melanggar itu bisa berlangsung secara adil, seperti mempermudah penanganan terhadap sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan agar adanya kejelasan tentang catatan pelanggaran siswa sehingga diterapkanlah sistem poin, sistem poin dipilih dikarenakan pelaksanaannya yang mudah dimengerti baik pihak sekolah, wali siswa dan terutama siswa itu sendiri dan juga kita telah melihat kesuksesan sistem poin di sekolah tetangga kita, dimana tingkat pelanggaran siswanya menurun setelah diterapkannya sistem poin, jadi kita tidak ragu lagi untuk menerapkan sistem poin di sekolah kita ini". (AS, 10.19, 27 okt 2021)</p> <p>YRP (F1,D1,d1,P1)</p>	<p>Kabupaten Tana Toraja SMA Negeri 5 terus melakukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswanya salah satunya dengan penerapan sistem poin pelanggaran, hal ini di latar belakang karena maraknya pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Letaknya yang tepat berada di pusat Ibukota Kabupaten tentunya akan menjadi perhatian masyarakat bila ada siswa yang bolos ataupun melakukan kegiatan yang tidak senonoh di luar lingkungan sekolah misalnya merokok, hal ini tentunya akan merusak nama baik sekolah, dan dengan adanya sistem poin siswa yang melakukan pelanggaran akan lebih muda untuk dibina karena sistem poin di sekolah ini</p>	<p>sekolah yang dilakukan oleh para siswa diberikan sanksi yang memiliki tingkatan poin pelanggaran sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa.</p> <p>Dalam Permendiknas RI No 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah, bagian B nomor 9 mengatur pedoman pelaksanaan tata tertib dalam poin c sebagai berikut:</p> <p>“sekolah/madrasah menetapkan pedoman tata tertib yang berisi: 1) tata tertib pendidik, tenaga Pendidikan, dan peserta didik, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan; 2) petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di sekolah/madrasah, serta</p>
--	--	--	---	---

		<p>“sistem poin saat itu diterapkan dari jamannya pak Eli Tawan masih menjadi kepesek tahun 2008, dikarenakan banyaknya siswa yang sering bolos dan tanpa keterangan dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya dan terlebih saya melihat bahwasanya dalam penyelesaian kasus pelanggaran yang dilakukan siswa ada sebuah ketimpangan, dimana sebagian guru terkesan membeda-bedakan siswa. misalnya ada hubungan keluarga yah biasanya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari anak yang lain, hal inilah yang mau kita ubah sehingga kita terapkan sistem poin ini, kan dalam sistem poin semua pelanggaran bobot poinnya sama, jadi mau dia anak kepala daerah atau siapapun tetap akan mendapatkan sanksi yang sama seperti siswa lainnya”. (YRP, 18.25, 27 okt 2021)</p> <p>SP (F1,D1,d1, P1)</p>	<p>berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah sehingga masyarakat bisa melaporkan jika ada siswa yang terlihat melakukan pelanggaran di luar sekolah</p>	<p>pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib”.</p>
--	--	---	---	---

		<p>“jadi ini sistem poin mulai diterapkan sejak Pak Eli Tawan masih menjadi kepala sekolah disini, kalau tidak salah tahun 2008 itu mulai berlaku. yang menjadi latar belakang diterapkannya itu untuk mendisiplinkan siswa, mengefektifkan siswa agar bisa belajar lebih giat, dan selanjutnya menjadikan SMA 5 menuju sekolah unggulan”. (SP, 11.58, 29 okt 2021)</p>		
	<p>Pihak Pelaksana (SDM)</p>	<p>AS (F1,D2,d1,P2)</p> <p>“tentu penanggung jawab utama adalah kepala sekolah, dan juga termasuk guru dan staf pegawai semua ikut berperan dalam pelaksanaan sstem poin di sekolah. Kemudian ditindak lanjuti oleh kesiswaan yang diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk menangani sistem poin ini, yang mana di kesiswaan ada tiga staf yang terdiri dari guru, kemudia saya bagi tugas</p>	<p>peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan selama peneliti berada di lokasi penelitian pada 27 oktober – 2 November 2021. Setiap guru yang mendapatkan siswa yang melakukan pelanggaran berhak untuk memberikan poin kepada siswa tersebut, selama peneliti berada di lokasi</p>	<p>Adapun teori yang mendukung yaitu Menurut Susanto (2015) personel sistem poin mempunyai kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan sistem poin dan mempunyai garis koordinasi satu dengan yang lain sehingga dalam penerapannya kepada siswa akan terjalin kerjasama dan komunikasi yang baik antar komponen pelaksana.</p>

		<p>tiap guru itu untuk mencatat/menginput poin siswa tiap kelas/tingkatan, untuk kelas 12 ditangani oleh pak Stanis, untuk kelas 10 ditangani oleh pak Annas, untuk kelas 10 oleh ibu Djuti”. (27/10/21)</p> <p>(F1,D2,d2,P2) kesadaran para guru bisa saya katakan bahwa umumnya guru sadar dan ikut serta dalam mempertanggung jawabkan sistem poin, hanya saja bagaimanapun juga namanya kita manusia punya karakter yang berbeda-beda kadang juga ada yang komplain sendiri terhadap poin yang ada bilamana siswa itu sudah mau mengarah ke finish atau dikembalikan ke orang tua”. (27/10/21).</p> <p>YRP (F1,D1,d1,P2)</p> <p>“Jadi dalam penerapan sistem poin di sekolah seluruh jajaran guru dan staf pegawai turut andil dalam pelaksanaannya, jadi pegawai pun berhak untuk memberikan poin ke siswa yang</p>	<p>penelitian peneliti mengamati terkadang ada saja siswa yang keluar dari kelas untuk menghadap ke guru piket untuk meminta kertas poin pelanggaran dikarenakan kedapatan melakukan pelanggaran tata tertib oleh guru yang mengajar di kelas dan kebanyakan pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak membawa buku paket. Selain itu ada tiga orang siswa yang kedapatan oleh guru karena meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran masih berlangsung dan asik bercerita di toilet karena pada saat itu guru yang mengajar di kelasnya berhalangan untuk masuk mengajar maka siswa tersebut langsung diberikan kertas poin pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa</p>	
--	--	---	--	--

		<p>melanggar tatib, hanya saja jarang-jarang terjadi itu pegawai yang memberikan poin mungkin karena memang mereka tidak berhadapan langsung dengan siswa beda dengan kita yang guru-guru.</p> <p>“Peran Guru BK bekerjasama dengan kesiswaan dan wali kelas untuk melakukan bimbingan kepada siswa yang poinnya sudah tinggi, maka dari bimbingan itu sehingga kita bisa tau mengapa siswa ini sering melanggar tata tertib agar kiranya bisa diberikan solusi dari masalah yang ia hadapi. Dalam sistem poin sudah di atur bahwa nanti setelah siswa mendapatkan poin baru di bombing sehingga kadang yang bisa kita lakukan hanya fungsi pencegahan (preventif) dan fungsi perbaikan artinya kita cegah agar tidak melakukan pelanggaran lagi dikemudian hari. (27/10/21)</p>	<p>pelaksana sistem poin di sekolah merupakan tanggung jawab semua guru dan setiap guru yang mendapatkan pelanggaran tata tertib berhak untuk memberikan poin kepada siswa yang bersangkutan.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>(F1,D2,d2,P2) Kalau saya lihat kesadaran guru dan pegawai dalam pelaksanaan sistem poin itu menurut saya semuanya sudah bagus tapi mungkin biasa ada-ada saja beberapa guru yang malas kasih poin misalnya lupa kerja tugas atau jikalau dia tahu kalau poin siswa ini sudah tinggi, kan siswa-siswa kita ini sudah kita anggap anak sendiri jadi kadang kita tidak tega jika ada siswa yang harus keluar atau DO karena cukup poinnya”. (27/10/21)</p> <p>PT (F1,D2,d2,P2)</p> <p>“semua pihak sekolah bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem poin, jadi tidak ada dikatakan bahwa cuma pihak ini yang bertanggung jawab, intinya semua pihak sekolah ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Peran guru BK yaitu melakukan pembinaan bersama wali kelas, kesiswaan dan orang tua jika poin siswa</p>		
--	--	---	--	--

		<p>sudah tergolong tinggi, jadi dalam pembinaan BK tidak bisa sendiri melakukannya karena aturan dalam sistem poin sudah begitu hanya 3 kali pembinaan, tapi kita juga bisa melakukan pembinaan khusus dari BK jika anak tersebut masih terus melanggar tata tertib, karena itu sudah jadi tugasnya kita untuk membina para siswa dan pembinaan ini kita lakukan diluar dari sistem poin</p> <p>(F1,D2,d2,P2) “kesadaran para guru, tidak bisa dipungkiri bahwa ada guru yang biar siswa melakukan pelanggaran dia tidak berikan poin jadi tergantung pribadi guru masing-masing” (PT, 11.36, 27 okt 2021)</p> <p>SP (F1,D2,d1,P2)</p> <p>“pihak pelaksana atau yang bertanggung jawab dalam penerapan sistem poin adalah kepala sekolah dan semua guru termasuk juga pegawai”</p>		
--	--	---	--	--

		<p>“Tugas wali kelas ialah menerima rekapitulasi poin pelanggaran dari kesiswaan dan melakukan pemanggilan siswa dan wali siswa apabila poinnya sudah memenuhi untuk dilakukan pemanggilan yang selanjutnya dilakukan pembinaan bersama kesiswaan dan guru BK”.</p> <p>(F1,D2,d2,P2) Kesadaran para guru dalam menjalankan sistem poin, wajib bagi setiap guru untuk memberikan poin jika ada siswa yang melanggar, jadi para guru menjalankan dengan baik sistem poin ini”. (29/10/21)</p> <p>HK (F1,D2,d2,P2)</p> <p>“Yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem poin di sekolah adalah semua warga sekolah mulai dari kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru, bahkan siswa juga harus bertanggung jawab terhadap poinnya”.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>“sebagai wali kelas tugas saya menerima poin-poin pelanggaran yang anak wali saya dapatkan kemudian mencatat poin yang didapat siswa kedalam buku pelanggaran, serta mengkomunikasikan dengan wali siswa jika siswa tersebut sering melanggar tata tertib”.</p> <p>(F1,D2,d2,P2) Dari kesadaran para guru sejauh ini yang saya amati bahwa semua guru sadar dan mengerti soal tanggung jawabnya menjalankan sistem poin”. (HK, 9.43, 29 okt 2021)</p>		
	Tata Aturan Sistem Poin	<p>AS (F1,D3,d1,P3)</p> <p>“jadi setiap kenaikan kelas, pelanggaran atau poin siswa dari tahun ajaran sebelumnya diputihkan atau kembali menjadi nol, jadi jumlah poin hanya berlaku selama satu tahun ajaran. bisa juga dilakukan pengurangan poin jika siswa mendapat prestasi semisal ikut olimpiade dan</p>	<p>peneliti melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada hari Senin, 1 November 2021, tata aturan dalam sistem poin pelanggaran sudah terlaksana dengan mekanisme mulai dari pemberian poin sampai penginputan poin, peneliti</p>	<p>Dokumentasi dalam hal ini adalah buku tata tertib dan poin pelanggaran yang memuat aturan dalam sistem poin.</p> <p>Adapun teori yang mendukung dijelaskan menurut Rahmadi (2017) sebuah peraturan akan belajar dengan lancar, tidak terlepas dari dua hal yaitu, 1) hukuman atau sanksi; 2) penghargaan atau reward, dua hal</p>

		<p>juara, jika dia punya poin akan di kurangi sesuai aturan dalam tata tertib”.</p> <p>(F1,D3,d2,P3) “Setiap piket atau guru yang melihat bahwa ada pelanggaran yang dilakukan siswa lalu kertas poin itu diberikan kepada kami kesiswaan untuk di input, setelah di input maka disinilah bisa ketahuan bahwa anak ini sudah cukup poin maka dibuatkanlah daftar pembinaan”. (27/10/21)</p> <p>YRP (F1,D3,d1,P3)</p> <p>“jadi kalau penaikan kelas poin siswa kembali ke semula atau nol lagi dan biasa juga ada pengurangan poin jikalau siswa tersebut mendapat prestasi, dan nanti poin 100 yah sudah di DO, itu sudah lengkap dijelaskan dalam buku tatib siswa.</p>	<p>mengamati bahwa setiap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa sudah diberikan poin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, seperti saat ada siswa yang terlambat maka akan diberikan lima (5) poin, guru piket dan satpam selalu berjaga di pintu gerbang sehingga ketika ada siswa yang terlambat maka akan langsung diberikan poin. Setiap kertas poin yang didapatkan oleh siswa akan di kumpulkan oleh guru yang bersangkutan ke ruang kesiswaan, setelah dikumpulkan maka poin tersebut akan didiput oleh staf bagian kesiswaan yang terdiri dari tiga orang.</p>	<p>ini tentunya akan dapat dilakukan melalui sistem poin pelanggaran</p> <p>Menurut Taqiyya (2013) Setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib diberikan skor poin pelanggaran oleh guru dengan menulis nama, kelas, jenis pelanggaran dan jumlah poin pada kertas poin, kemudian kertas poin tersebut diserahkan ke bagian kesiswaan untuk di rekapitulasi ke dalam buku poin pelanggaran siswa.</p>
--	--	---	---	---

		<p>(F1,D3,d2,P3) “Untuk alur pencatatan poin itu nak setiap guru yang memberikan poin ke siswa yang melanggar, kertas poin itu dikumpulkan di kesiswaan atau biasa jika tidak ada kesiswaan dikumpulkan ke guru piket dulu kemudian nanti piket yang berikan ke kesiswaan, jadi nanti di kesiswaan ada yang bertugas untuk menginput itu poin yang didapat oleh siswa”.</p> <p>(27/10/21_YRP)</p> <p>SP (F1,D3,d1,P3)</p> <p>“setiap pelanggaran itu ada poinnya masing-masing beserta sanksinya, intinya siswa yang sudah cukup poin 100 akan dikembalikan ke orang tuanya”.</p> <p>(F1,D3,d2,P3) “kertas poin itu asalnya dari bisa dari guru atau piket kemudian ke</p>		
--	--	---	--	--

		kesiswaan dan selanjutnya diinput oleh yang sudah bertugas”. (29/10/21)		
	Prosedur Penanganan	<p>AS (F1,D4,d1,P4)</p> <p>“pelanggaran yang langsung mendapat bimbingan khususnya dari kesiswaan dan BK ya tentunya pelanggaran yang berat misalnya saja berkelahi atau kedapatan merokok di sekolah, kemudia untuk pelanggaran yang tidak langsung mendapatkan bimbingan seperti terlambat, tidak memakai atribut yang lengkap atau tidak kerja tugas”. (27/10/21)</p> <p>(F1,D4,d2,P4) “untuk penanganan pelanggaran siswa sudah kita atur sedemikian rupa pada jumlah poin tertentu untuk dilakukan pembinaan, untuk pembinaannya, kesiswaan menyampaikan kepada wali kelas bahwa anak walinya ini jumlah ponnya sudah mencapai syarat pembimbingan untuk</p>	<p>peneliti juga melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada tanggal 27 oktober – 2 November 2021. Pelanggaran tata tertib yang ringan seperti terlambat tidak akan langsung mendapatkan pembinaan namun hanya dicatat poinnya. Pembinaan siswa dengan akumulasi poin tinggi sudah terlaksana dengan baik, hal ini didukung dengan setiap harinya ada saja orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk melakukan pembinaan terkait pelanggaran anaknya, pembinaan ini dilakukan di ruangan BK yang dihadiri</p>	<p>Dokumentasi dalam hal ini berupa rekapan poin siswa yang sudah mencapai akumulasi untuk pembinaan atau pemanggilan orang tua.</p> <p>Adapun teori yang mendukung, Tu’u (2004) dengan adanya sanksi hukuman di sekolah siswa akan merasa takut untuk melanggar aturan yang ada, maka dari itu bentuk hukuman disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh siswa</p> <p>Hidayani (2013) setiap poin pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa dikumpulkan sampai batas tertentu selama satu semester, jika poin pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa telah mencapai batas maksimal, maka kartu</p>

		<p>selanjutnya dilakukan pemanggilan orang tua/wali, pemanggilan wali pertama dilakukan saat poin 30, pemanggilan kedua 50 dan pemanggilan ketiga poin 75, jadi setelah wali kelas memanggil orang tua maka wali kelas, kesiswaan dan BK berkolaborasi untuk melakukan pembinaan bersama dengan orang tua siswa di sekolah”. (27/10/21)</p> <p>(F1,D4,d3,P4) “sesungguhnya tatib kami itu berlaku di dalam dan di luar sekolah, misalnya ada yang berkelahi di luar kemudian ditangkap oleh pihak berwajib yah kami ikut dalam hal pembinaan tapi kami tidak mencampuri dalam hal hukumnya, pokoknya selama masih berstatus menjadi siswa disini walaupun sudah tidak pakai atribut sekolah, kan masih membawa nama baik sekolah maka akan tetap dikenakan poin, namun dalam pemberian poin</p>	<p>oleh wakasek bidang kesiswaan, guru bimbingan konseling, wali kelas, orang tua dan siswa yang bersangkutan.</p>	<p>kuning tadi (peringatan) dapat berubah menjadi kartu merah sebagai isyarat bahwa siswa tersebut harus dikeluarkan dari sekolah.</p> <p>Menurut Taqiyya (2013) bahwa siswa dapat diberi poin pelanggaran apabila dia melanggar tata tertib sekolah selama mereka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berada dalam lingkungan sekolah, baik ketika sedang belajar, waktu istirahat, waktu ibadah, atau berada di kantin sekolah. 2) Berada di lingkungan sekolah di luar jam belajar resmi, termasuk pada kegiatan les (pengayaan) di sore hari atau pada kegiatan ekstrakurikuler yang ditentukan sekolah. 3) Memakai pakaian seragam sekolah, termasuk dalam perjalanan, baik ketika pergi
--	--	---	--	---

		<p>kami harus bijak melihat setiap kasus”. (27/10/21)</p> <p>(F1,D4,d4,P4) “saya lihat pelanggaran yang terjadi belum ada yang saya lihat bahwa ini tidak ada dalam tatib, jadi bisa saya katakan bahwa tatib kami itu mampu mengcover semua hal yang bisa menjadi pelanggaran siswa”. (27/10/21)</p> <p>YRP (F1,D4,d1,P4)</p> <p>“biasanya pelanggaran yang ringan-ringan itu yang hanya dicatat poin, dalam artian tidak mendapatkan bimbingan setelah itu, nah kalau berkelahi atau membully temannya akan kita kenakan poin dan sekaligus mendapat bimbingan khususnya kami di BK tapi jarang-jarang terjadi yang kasus seperti itu kebanyakan kami tangani yang memang sudah cukup poin”.</p> <p>(F1,D4,d2,P4) “penanganan siswa yang poinnya sudah tergolong tinggi itu dilakukan</p>		<p>sekolah maupun dalam perjalanan sepulang dari sekolah</p>
--	--	--	--	--

		<p>tiga tahap pemanggilan wali, nanti dilakukan pemanggilan orang tua saat poinnya sudah 30 itu pemanggilan pertama, pemanggilan kedua di poin 50 kemudian ketiga di poin 75 keatas dan ketika poin sudah 100 selanjutnya wali siswa kita arahkan ke kepala sekolah sebagai pemegang keputusan. (27/10/21)</p> <p>(F1,D4,d3,P4) “pelanggaran yang terjadi di luar sekolah itu baik laporan dari masyarakat ataupun guru sendiri yang dapat tetap itu di proses di sekolah kalau itu mencoreng nama baik sekolah kita, tapi tidak serta merta dikasih poin biasa juga hanya berupa pembimbingan”.</p> <p>(F1,D4.d4,P4) “selama ini belum ada kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan sistem poin, belum pernah terjadi, adapun jika nanti kedepannya terjadi yah kami pihak sekolah akan</p>		
--	--	---	--	--

		<p>melakukan penyesuaian”. (27/10/21)</p> <p>PT (F1,D4,d1,P4)</p> <p>“terlambat, atribut tidak lengkap hal-hal seperti itu yang bobot poinnya 3-5 dalam artian poinnya rendah yah, kalau yang langsung dibimbing pelanggaran yang biasanya terlalu menonjol dalam hal negatif misalnya pukul temannya atau membully temannya”.</p> <p>(F1,D4,d2,P4) “kita di BK jangankan saat pemanggilan orang tua sebelum pemanggilan pun jika wali kelasnya rasa untuk perlu diberikan pembinaan yah kita bimbing, meskipun mereka susah untuk berubah dalam jangka waktu singkat tapi kita tetap usahakan berikan motivasi dan arahan sehingga dia bisa berubah sehingga poinnya tidak terus bertambah”. (27/10/21)”.</p> <p>(F1,D4,d3,P4) “yang terjadi di luar sekolah misalnya</p>		
--	--	---	--	--

		<p>perkelahian tetap kita tangani, dalam bimbingannya banyak pihak yang kami libatkan ada dari perlindungan anak, kesiswaan, guru agama dan orang tua karena kasus seperti itu harus ditangani secara bersama-sama, tapi kasus-kasus diluar sekolah hanya sekali-kali terjadi”.</p> <p>(F1,D4,d4,P4) “selama kurang lebih dua tahun saya disini saya belum pernah menemukan kasus seperti itu artinya kami di BK belum pernah menangani kasus yang tidak ada dalam tata tertib”. (27/10/21)</p> <p>SP (F1,D4,d1,P4)</p> <p>“jadi yang langsung mendapat bimbingan seperti mencuri, valdalisme, merokok dan berduaan dengan pacar di sekolah”.</p> <p>(F1,D4,d2,P4) orang tua sudah dipanggil jika poinnya sudah 30 panggilan pertama, panggilan</p>		
--	--	--	--	--

		<p>kudua 50 dan panggila ketiga dilakukan menjelang 100 dan yang bertugas memanggil itu adalah kami selaku wali kelasnya”.</p> <p>(F1,D4,d3,P4) “dulu sebelum pandemi misalnya siswa yang berkelahi atau merokok di luar sekolah itukan membawa nama baik sekolah jadi ada poin pelanggarannya, laporannya bisa dari temannya, masyarakat maupun kepolisian”.</p> <p>(F1,d4,D4,P4) “tidak pernah terjadi pelanggaran yang seperti itu”.</p> <p>HK (F1,D4,d1,P4)</p> <p>“Yang langsung mendapatkan bimbingan yaitu apabila dia melakukan pelanggaran berat dengan poin yang tinggi contohnya apabila kedatangan menggunakan HP saat jam pelajaran tanpa seizin guru karena itu poinnya langsung 50, kemudian yang hanya dicatat</p>		
--	--	---	--	--

		<p>dulu misalnya seperti terlambat, tapi setiap pelanggaran yang dilakukan siswa tentunya akan tetap mendapat teguran atau nasehat dari guru yang mendapatkan”. (29/10/21</p> <p>(F1,D4,d2,P4) biasanya ada rekapan poin untuk wali kelas yang diberikan dari kesiswaan dan setiap kali kita mendapatkan anak wali kita melanggar itu biasa kita bimbing langsung misalnya dalam kelas atau saat kita mengajar di kelas dan bisa juga dengan BK dan jika poinnya sudah mencapai batas pemanggilan maka ada pembimbingan bersama dengan orang tua di sekolah dan itu ada tiga kali pemanggilan”.</p> <p>(F1,D4,d3,P4) “kalau terjadi pelanggaran diluar sekolah dan kita mendapatkan laporan dari masyarakat atau dari pihak lain tetap kita lakukan pembinaan”. (29/10/21)</p>		
--	--	--	--	--

		<p>AN (F1,D4,d3,P4)</p> <p>kalo kasus diluar masih di proses itu kayak misalnya perempuan hamil duluan begitu kak otomatis kan pasti kena poin itu dan langsung keluar”. (11.24, 01/11/21)</p> <p>R (F1,D4,d3,P4)</p> <p>“kalo diluar sekolah tidakmi biasa kecuali kalo merokok pake baju sekolah”. (R, 8.50, 2 Nov 2021)</p> <p>EP (F1,D4,d3,P4)</p> <p>“kalo diluar sekolah biasanya iya kak” (11.42, 2 Nov 2021)</p> <p>PC (F1,D4,d3,P4)</p> <p>“kalo misalnya natau guru toh biasa dipoin”. (9.19, 2 Nov 2021)</p>		
	Faktor penghambat dan Faktor pendukung	<p>AS (F1,D5,d1,P5)</p> <p>“kendala yang kami temui itu kadang pelanggaran-pelanggaran dari siswa itu tidak diberi poin oleh guru jadi biasa hanya</p>	<p>peneliti juga melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada pada Tanggal 27 oktober – 2</p>	

		<p>ditegur saja dan berikutnya adalah kadang ada saja pemanggilan orang tua itu tidak cepat direspon oleh orang tua siswa akhirnya yang kami lakukan adalah kunjungan ke rumahnya, faktor lain itu khususnya di bagian penginputan poin siswa karena staf kami di kesiswaan itu adalah guru jadi kadang mereka punya kesibukan lain juga sehingga sulit membagi waktunya sehingga biasanya rekapan poin siswa itu lambat dikerjakan, makanya terkadang sudah lebih poinnya baru ketahuan bahwa anak ini seharusnya sudah dapat bimbingan”. (27/10/21_AS)</p> <p>“kalau dari faktor pendukungnya itu tentunya adanya kerjasama yang baik antara pihak sekolah dalam mengawasi perilaku siswa-siswa kita, kemudian adanya dukungan yang baik dari orang tua siswa sehingga sistem poin ini masih terlaksana dengan baik sampai saat ini, dan</p>	<p>November 2021. Faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem poin yaitu masih ada beberapa guru yang tidak memberikan poin kepada siswa yang melanggar tata tertib dan orang tua siswa yang kadang lambat merespon surat pemanggilan dari sekolah sehingga kadang satu atau dua minggu baru hadir di sekolah untuk melakukan pembinaan bersama guru di sekolah. Faktor pendukung dalam pelaksanaan sistem poin yaitu kinerja yang baik dari pihak kesiswaan dalam mengelola poin pelanggaran siswa dimana ketiga staf di kesiswaan yang menginput poin terdiri dari guru yang ditengah kesibukannya mengajar masih menyempatkan diri untuk</p>	
--	--	--	---	--

		<p>mayoritas siswa sudah sadar dan menaati akan setiap aturan yang berlaku dalam sistem poin”.</p> <p>YRP (F1,D5,d1,P5)</p> <p>“kalau kendala yang saya temui khususnya di BK adalah siswa yang susah untuk dibina jadi poinnya selalu bertambah hingga akhirnya keluar, kemudian masalah kesadaran orang tua siswa kadang itu ada saja orang tua yang malas datang ke sekolah jadi kita susah untuk lakukan bimbingan bersama dengan orang tuanya, akhirnya biasa wali kelasnya yang kerumah”. (27/10/21_YRP)”.</p> <p>“kemudian untuk faktor yang mendukung kelancaran sistem poin itu tentunya yang pertama sinergitas antar warga sekolah, kedua dukungan orang tua dan dari siswa itu sendiri karena dengan meningkatnya disiplin siswa berarti ini sistem poin sangat baik”.</p>	<p>menginput poin pelanggaran siswa.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>PT (F1,D5,d1,P5)</p> <p>“mungkin yang jadi masalah adalah kita di BK dalam pembinaan harusnya membina siswa tersebut sampai dia berubah namun sistem poin yah punya aturan tersendiri sehingga kadangkala belum selesai dibina siswa tersebut sudah cukup poinnya karena melakukan pelanggaran lagi sehingga akhirnya keluar dan tidak semua siswa bisa berubah secara singkat, tapi ini sudah aturan sekolah jadi kita dari BK menyesuaikan saja, jadi memang sistem poin ini agak membatasi fungsi atau bertentangan dengan fungsi BK”. (27/10/21)</p> <p>“faktor pendukungnya bisa kita lihat dari adanya kerjasama yang baik khususnya antar orang tua, wali kelas, kesiswaan dan BK untuk melakukan bimbingan terhadap siswa yang melanggar tata tertib”.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>SP (F1,D5,d1,P5)</p> <p>“kendala yang pertama dari siswa itu sendiri yang tidak mengindahkan dengan adanya sistem poin karena karakternya yang memang susah untuk di atur sehingga akhirnya keluar, kedua dari guru, ada diantara guru-guru yang tidak menjalankan sesuai aturan kadang menutup-nutupi mungkin karena anak walinya, mungkin juga karena keluarganya sehingga guru yang bersangkutan tidak memberikan poin”. (29/10/21).</p> <p>“seperti yang saya katakan tadi bahwa orang tua sangat mendukung dengan adanya sistem poin ini, jadi adanya kerjasama yang baik antar pihak sekolah dan wali siswa, saya rasa itulah yang menjadi pendukung dari poin ini”. (29/10/21)</p> <p>HK (F1,D5,d1,P5)</p> <p>“kalau kendala yang saya temui selaku wali kelas biasanya dari</p>		
--	--	--	--	--

		<p>siswa itu sendiri, memang beberapa anak itu sangat sulit untuk dibina jadi selalu saja melanggar hingga pada akhirnya yah harus keluar kerena poinnya cukup 100, kendala lainnya biasanya orang tua siswa yang susah dihubungi jadi agak sulit untuk mengkomunikasikan terkait kedisiplinan anaknya di sekolah,”. (29/10/21_HK)</p> <p>“yang pasti sebagai faktor pendukungnya tentunya karena adanya usaha/kerjasama yang baik dari pihak sekolah dalam menjalankan sistem poin ini, kemudian sebagian besar siswa kita sudah menaati setiap tata tertib yang ada di sekolah”.”.</p>		
	<p>Dampak Sistem Poin Terhadap Kedisiplinan Siswa</p>	<p>AS (F2,D1,d1,P1)</p> <p>“memang sistem poin ini di SMA 5 sangat akurat untuk meredam kenakalan siswa, makanya sampai saat ini kita masih mempertahankan sistem poin ini karena tidak</p>	<p>peneliti juga melakukan observasi (pengamatan) yang dilakukan pada Tanggal 27 Oktober – 2 November 2021. Penerapan sistem poin cukup</p>	

		<p>mungkin kita mempertahankan sesuatu kalau itu tidak memberikan dampak yang baik. Kalau disini mungkin karena sistem poinnya itu sungguh membuat anak untuk ngerem itu berbagai model-model untuk mencari masalah yang bisa dilihat sebagai sebuah pelanggaran dan juga disini jarang-jarang itu terjadi kenalakan remaja khususnya berkelahi, mungkin di sekolah lain kasus ini sering terjadi tapi disini karena adanya sistem poin sehingga siswa tidak berani untuk melakukan itu karena jika berkelahi sudah pasti di keluarkan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa siswa yang sering melanggar tapi itu hanya sebagian kecil saja". (27/10/21)</p>	<p>berdampak dalam meningkatkan kedisiplinan siswa dimana semenjak penerapan sistem poin sudah tidak ada siswa yang kedapatan bolos sekolah hal ini juga didukung karena pagar sekolah yang tinggi sehingga tidak mungkin dipanjat oleh siswa. Kemudian sudah tidak ada siswa yang kedapatan merokok di sekolah dikarenakan setiap kelas dan sudut sekolah dipasang cctv yang langsung terhubung pada layar monitor di ruang kepala sekolah sehingga setiap aktivitas siswa akan diawasi. Namun masih banyak siswa yang sering terlambat, setiap harinya ada saja siswa yang mendapat poin karena terlambat hal ini dimungkinkan karena sebagian besar siswa datang</p>	
--	--	---	---	--

		<p>(F2,D1,d2,P1) “sebelum pemberlakuan sistem poin memang begitu banyak pelanggaran jadi bermacam-macam pelanggaran yang dilakukan siswa. Tetapi setelah ada sistem poin yakin bahwa itu bisa meredam karena akan selalu dipikirkan oleh siswa bahwa ini kita akan diberi poin jika melanggar sehingga kedepannya dia bisa lebih mendisiplinkan dirinya”.</p> <p>(F2,D1,d3,P1) “kalau disini pelanggaran yang paling banyak itu terlambat, alasan mengapa terlambat dikarenakan tidak ada kendaraan dan akibat juga karena anak itu tidak peduli dirinya karena justru yang lebih dekat rumahnya dengan sekolah yang banyak terlambat karena mungkin dia anggap remeh dengan waktu</p>	<p>ke sekolah menggunakan angkutan umum sedangkan penumpang pada angkutan umum semenjak pandemic covid-19 dibatasi, sehingga siswa kesulitan mencari angkutan.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>dan jarak itu sehingga akhirnya terlambat juga”.</p> <p>YRP (F2,D1,d1,P1)</p> <p>“yah sudah pasti sangat berdampak positif bagi siswa karena dengan adanya sistem poin ini siswa lebih semangat dalam belajar misalnya, dalam mengerjakan tugas karena kalau tidak mengerjakan tugasnya yah sudah pasti kena poin dari guru yang memberikan tugas itu dan juga siswa lebih menghargai waktu karena kalau terlambat datang di sekolah atau terlambat masuk saat jam pelajaran apalagi kalau alpa ada juga poinnya”</p> <p>(F2,D1,d2,P1) “sebelum ini poin diterapkan di SMA 5 luar biasa sekali itu yang namanya pelanggaran siswa misalnya saja bolos, alpa, apalagi kalau</p>		
--	--	--	--	--

		<p>terlambat, dulu kalau sudah mau masuk jam sekolah biasanya itu guru turun dulu ke lorong untuk mengejar ini anak-anak baru mereka berlarian masuk ke sekolah bahkan dulu guru sering menemukan siswa yang merokok di toilet. tapi sekarang sudah ada sistem poin kalau mereka sengaja untuk terlambat atau melanggar tata tertib berarti mereka sendiri yang menghukum dirinya dengan mendapat poin, jadi selama pelaksanaan sistem poin sudah tidak pernah ditemukan siswa kita yang merokok di lokasi sekolah apalagi bolos". (27/10/21)".</p> <p>(F2,D1,d3,P1) "pelanggaran yang paling dominan dilakukan siswa itu terlambat dan atributnya tidak lengkap jadi kadang ada yang lupa</p>		
--	--	--	--	--

		<p>bawa dasi dan lain sebagainya, dan untuk yang terlambat biasanya itu karena lambat bangun atau di jalan itu kadang saya lihat santai-santai saja jalan padahal jam pelajaran sudah mau dimulai”.</p> <p>PT (F2,D1,d1,P1)</p> <p>“secara kasat mata memang cukup meningkatkan kedisiplinan cuma yang jadi masalahnya apakah anak memang berubah dari dalam dirinya sendiri atau tidak. Contoh bahwa sistem poin cukup meningkatkan kedisiplinan misalnya hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan ada tercantum dalam sistem poin yah pasti mereka hindari jadi secara otomatis sistem poin juga cukup membantu, kenapa cukup membantu karena kalau misalnya kita tidak pakai</p>		
--	--	--	--	--

		<p>sistem poin dan semua guru serta pegawai tidak sadar akan kedisiplinan dan itu diberatkan kepada BK saja saya kira tidak akan efektif dan tidak akan mampu menangani sekian banyak siswa dengan satu dua orang BK untuk membina, jadi sistem poin ini cukup efektif untuk meningkatkan kedisiplinan siswa</p> <p>(F2,D1,d3,P1) “selama ini yang sering saya tamui itu keterlambatan, dan alasan utama siswa itu sering terlambat katanya karena begadang apalgi yang suka main game itu”.</p> <p>SP (F2,D1,d1,P1)</p> <p>“yah tentu berdampak sekali, justru itulah yang menyebabkan nilai jual SMA 5 semakin meningkat di</p>		
--	--	--	--	--

		<p>masyarakat jadi banyak orang tua yang sangat mendukung sistem poin ini karena tertib jadi mereka merasa bahwa anak-anaknya di didik dengan baik sehingga mereka sangat menginginkan anaknya sekolah disini,”.</p> <p>(F2,D1,d2,P1) “jadi sebelum sistem poin ada anak-anak yang memang susah dibina dan tetap berada di sekolah sehingga mempengaruhi teman-temannya karena kita juga sulit mencari sanksi yang tepat untuk membinanya. Setelah diberlakukan poin pelanggaran anak-anak yang susah dibina semakin berubah dan sadar bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat membuatnya keluar dari sekolah, Contohnya pelanggaran terlambat jadi dulu banyak yang terlambat setelah ada poin sudah jarang</p>		
--	--	--	--	--

		<p>yang terlambat kemudian dalam hal proses pembelajaran sudah sangat tertib”. (29/10/21)</p> <p>(F2,D1,d3,P1) “yang paling sering dilakukan anak-anak adalah terlambat, itu disebabkan karena di SMA 5 itu jam masuknya jam 7 jadi lebih awal dari sekolah lain, berikutnya adalah kendaraan yang mungkin terhambat kemacetan di jalan sehingga siswa terlambat”.</p> <p>HK (F2,D1,d1,P1)</p> <p>(F2,D2,d1,P1) “Sangat efektif, awalnya mungkin mereka merasa sulit untuk mengikuti namun lama kelamaan mereka akan terbiasa dengan sistem poin, contohnya pelanggaran yang sering terjadi misalnya keterlambatan setelah dia</p>		
--	--	---	--	--

		<p>mendapatkan poin hari ini biasanya keesokan harinya dia akan datang lebih cepat agar tidak dapat poin lagi, contoh lainnya anak-anak lebih rajin membawa buku paket dan mengerjakan tugas karena kalau tidak akan diberikan poin oleh guru yang masuk mengajar”. (29/10/21).</p> <p>(F2,D1,d3,P1) “pelanggaran yang paling sering muncul itu adalah keterlambatan masuk jam sekolah, penyebabnya karena mungkin terbiasa lambat dirumah dan yang lainnya juga kadangkala karena cuaca”.</p> <p>SISWA</p> <p>AN (xii ibb 1)</p> <p>(F2,D1,d1,P1)</p>		
--	--	---	--	--

		<p>“kalau menurut saya kak sistem poin di sekolah itu bagus di adakan karena itu membuat siswa kek disiplin begitu, baru kan kalo ada poin kayak berbeda dengan sekolah lain dan menurut saya berdampak sekali dengan kedisiplinan siswa karena misalnya tanpa sistem poin itu kek misalnya terlambat pasti merasa tidak adaji apa yang akan merugikan tapi kalo ada poin pasti akan menyesuaikan. untuk</p> <p>“hukumannya kalo saya itu kak jera karena kalo misalnya semakin dipupuk itu poin kita sudah susah masuk disekolah ini terus keluar itu kita rugi sekali kak “. (1/11/21)</p> <p>“kalo misalnya dari guru tergantung dari gurunya kak memang ada beberapa yang cubit tapi itu maksudnya kan</p>		
--	--	--	--	--

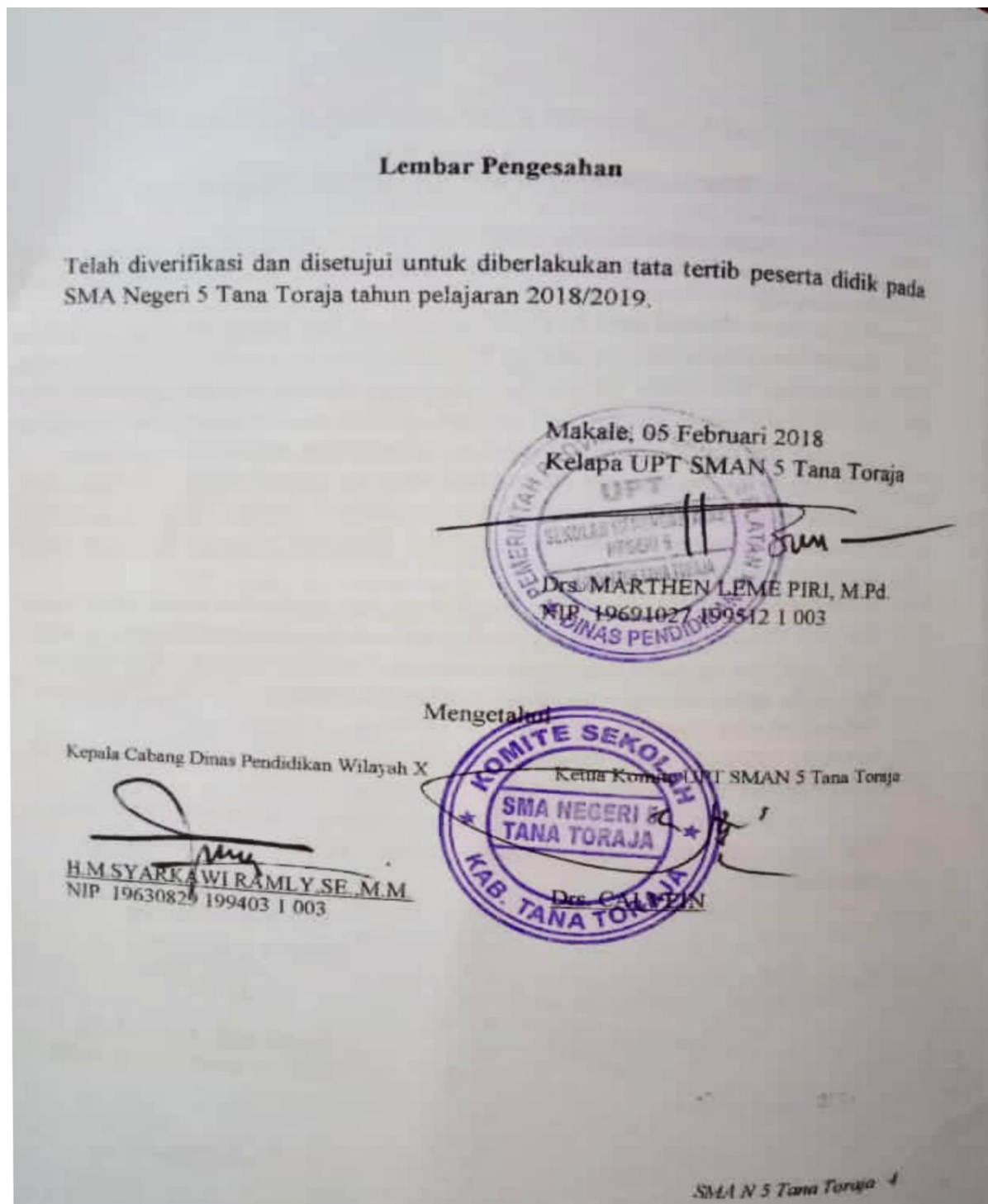
		<p>karena memang dalam proses mendidik”. (AN, 11.23, 1 Nov 2021)</p> <p>R (xii iis 1)</p> <p>“yang sering terlambat, yang dapat guru, penyebabnya karena sering begadang jadi susah bangun pagi, dipoin terusji kalo lakukan pelanggaran kalo didapat sama guru”.</p> <p>hukumannya cuma poin ji, jera tapi biasa dilakukanpi lagi karena itu terlambat, kalo pemanggilan orang tua belum pernah mungkin baru mauji ini tapi belum dikasih surat panggilan”.</p> <p>(F2,D1,d1,P1) “iya berdampak, karena takutki dikasih poin jadi berusaha sebaik mungkin kak supaya</p>		
--	--	--	--	--

		<p>tidak ada lagi poin baru” (R, 8.50, 2 Nov 2021)</p> <p>EP (xii iis 2)</p> <p>“terlambatji, yang dapat guru, penyebabnya nda tau karena cepatja siap-siap tapi lambatna otw, selaluji dipoin kalo dilihat guru”.</p> <p>“hukumannya cuma dapat poin, Untuk sanksi hukumannya lumayan jera ki kalo dapat poin kak tapi biasa masih di ulangi lagi karena maumi di apa kalo terlambat ki, pernah dulu waktu kelas 11 tapi baru satu kali karna 40 ponku itu hari”.</p> <p>(F2,D1,d1,P1) “menurutku iya berdampak, karena kan kalo dipoinki toh kalo semakin banyak poin bisaki keluar jadi kalo ada poin</p>		
--	--	--	--	--

		<p>takutki biasa melanggar lagi itu. (EP, 11.42, 2 Nov 2021)</p> <p>PC (xii mia 1)</p> <p>“cuma terlambat kak pas kedapat di gerbang kan digerbang itu biasa ada satpam sama guru piket, penyebabnya itu yang pernah upacara kematian tetanggaku nah itu jalannya tidak bisa jadi memutarna dulu, pernah tapi kan tidak naliat guru kalo naliat pasti dipoinki”</p> <p>“ndadaji hukuman selain poin kak, kalo sanksinya yah jerahki kak berusaha nda dipoin lagi, nda pernahpi”.</p> <p>(F2,D1,d1,P1) “menurutku toh kak lumayan karena nanti dipanggil orang tuata ke sekolah kalo banyak pointa”</p>		
--	--	--	--	--

Lampiran 4. Dokumentasi

Pengesahan Penerapan Sistem Poin



Bobot Poin Pada Setiap Pelanggaran Tata Tertib

No.	JENIS-JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.	Terlambat masuk sekolah (masuk sekolah diatas pukul 07.00 wita)	5
2.	Bolos (meninggalkan sekolah sebelum pukul 13.30 wita) kecuali haru jumat pukul 11.15 Wita.	20
3.	Terlambat masuk kelas pada pergantian jam pelajaran	5
4.	Masuk atau keluar kelas tanpa izin pada guru yang sedang mengajar	5
5.	Tidak membawa buku pelajaran yang sedang dibelajarkan	5
6.	Tidak mengikuti atau meninggalkan pelajaran yang sedang berlangsung	10
7.	Tidak hadir / alpa satu hari	10
8.	Membuat/menyampaikan surat atau pemberitahuan palsu ke sekolah	20
9.	Tidak menghadirkan orangtua pada saat pengambilan LHBS	10
10.	Bermain olahraga pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung di luar jam pelajaran olahraga	5
11.	Tidak mengikuti kegiatan hari-hari besar keagamaan sesuai agama yang dianutnya	10
12.	Tidak mengikuti ibadah/kegiatan keagamaan yang diprogramkan OSIS siesuai agama yang dianutnya	10
13.	Tidak mengikuti kegiatan ekskul pramuka. Wajib dan ekstrakurikuler lainnya.	5
14.	Tidak mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari senin dan upacara bendera Hari Besar Nasional yang dilaksanakan di sekolah tanpa keterangan atau alasan yang jelas	5
15.	Tidak berpakaian lengkap mengikuti upacara bendera (poin disesuaikan pelanggaran)	
16.	Tidak berpakaian seragam lengkap sesuai jadwal/ketentuan	10
17.	Tidak memakai seragam olahraga sekolah pada jam pelajaran penjaskes(khusus praktik)	10
18.	Berpakaian olahraga di luar jam pelajaran penjaskes	5
19.	Tidak memakai sepatu seragam SMAN 5 Tana Toraja	5
20.	Tidak memakai kaos kaki seragam SMAN 5 Tana Toraja	3
21.	Tidak memakai atribut sekolah, meliputi :	
	a. Papan nama	3
	b. Tanda lokasi sekolah	3
	c. Lambang OSIS	3
	d. Dasi	3
	e. Topi (pada saat upacara)	3
	f. Lambang bendera merah putih	3
	g. Logo SMAN 5 Tana Toraja	3
	h. Ikat pinggang tidak berwarna hitam	3

No.	JENIS-JENIS PELANGGARAN	SKOR
22.	Pakaian tidak rapi saat berada di lingkungan sekolah (kaki baju di luar celana/rok)	5
23.	Pakaian jilbab (bagi yang berjilbab) tidak sesuai ketentuan sekolah	5
24.	Rok putri kurang 5 cm di bawah lutut	5
25.	Pakaian ketat/jangkis	5
26.	Memakai jaket atau jas almamater di dalam kelas pada saat berlangsung kegiatan pembelajaran	5
27.	Pakaian seragam di coret-corek atau dirobek dengan sengaja (model)	5
28.	Rambut di cat/ disambung	5
29.	Rambut pria tidak di cukur sesuai ketentuan dan rambut wanita tidak di tata rapi	5
30.	Memakai emas atau aksesoris yang berlebihan (tidak lumrah bagi siswa)	5
31.	Siswa wanita bersolek secara berlebihan (memakai lipstik, maskara, dan sejenisnya yang tidak wajar bagi seorang siswa)	5
32.	Membiarkan kuku panjang, memakai pewarna kuku/kuteks dan sejenisnya yang tidak wajar bagi seorang siswa	5
33.	Membuang sampah bukan pada tempatnya	5
34.	Membawa dan mempergunakan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya ke dalam lokasi sekolah atau selama memakai atribut sekolah	100
35.	Membawa atau menyimpan obat-obat terlarang/narkotika ke dalam lokasi sekolah	50
36.	Mengedarkan dan atau menggunakan obat-obat terlarang/narkotika baik di dalam maupun di luar sekolah	100
37.	Berkelahi dengan sesama teman sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah	75

No.	JENIS – JENIS PELANGGARAN	SKOR
38.	Menganiaya teman sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah	100
39.	Melakukan perundungan (mem-bully) terhadap sesama teman sekolah	20
40.	Membuat jejaring sosial dengan kata-kata kotor, fitnah, kasar, makian, hinaan, sara dan hoax atau ancaman kepada orang lain	50
41.	Mengambil milik orang lain / mencuri.	50
42.	Memukul atau menganiaya Kepala Sekolah, Wakil kepala Sekolah, guru dan staf lain.	100
43.	Melakukan tawuran antar kelompok, antar kelas, atau antar sekolah :	
a.	Pelaku utama (termasuk otak dan provokator)	100
b.	Pelaku peserta (ikut-ikutan)	50
44.	Membawa buku porno, foto porno, VCD porno, gambar porno, dan sejenisnya.	50
45.	Melakukan hubungan seksual	100
46.	Menghamili atau dihamili.	100
47.	Melakukan pelecahan seksual, berpelukan, berciuman, dan atau perbuatan amoral lainnya (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).	75
48.	Membuat dan menyebarkan video/foto mesum di media sosial atau media lainnya	100
49.	Membuka/menonton acara lain dalam Laptop yang tidak relevan dengan pelajaran yang sedang berlangsung	10
53.	Menjual kupon bazar atas nama sekolah di lingkungan / luar sekolah, tanpa izin dari pihak sekolah	5
54.	Membawa rokok atau merokok dilingkungan sekolah	50
55.	Mentato sebagian atau seluruh anggota badan.	10
56.	Membawa dan atau meminum minuman keras dan sejenisnya di lingkungan sekolah	50
57.	Bermain judi dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah	50
58.	Merusak barang milik orang lain	50
59.	Merusak gedung sekolah, taman sekolah, perlengkapan sekolah (termasuk mencoret-coret atau mengotori dinding/tembok dalam lingkungan sekolah)	50
60.	Bermain bola atau sejenisnya di dalam kelas	5
61.	Masuk atau keluar sekolah memanjat pagar (mengelabui piket/Satpam)	25
62.	Menggunakan HP di lingkungan sekolah pada jam sekolah, kecuali untuk kepentingan pembelajaran dengan seizin guru mata pelajaran.	50
63.	Memarkir kendaraan bermotor di sembarang tempat di lingkungan sekolah	5
64.	Membawa kendaraan tanpa SIM dan STNK.	20
65.	Memakai kendaraan secara ugal-ugalan dalam lingkungan sekolah	15

Daftar Pembinaan Siswa Dengan Akumulasi Poin Tinggi

Hari, Tanggal : Senin, 02 Maret 2020

Daftar siswa yang sudah dan belum mendapat pembinaan sehubungan poin pelanggaran Kelas X Semester Ganjil dan Genap Tahun Pelajaran 2019/2020

No.Ur	Nama Siswa	L/P	Kelas	Poin	Tanggal Konfirmasi Orang Tua				
					1	2	3	4	5
1	Apsa Rambu Langi'	P	X IBB	63	27/9/19 (30)	22/1/20 (63)			
2	Eky Ramadani Yumus	L	X IBB	115	22/1/20 (40)	17/2/20 (90)	9/2/20 (115) Keluar		
3	Elsiana Ilo	P	X IBB	43	21/12/19 (30)				
4	Izha Iswari	P	X IBB	75	21/12/19 (30)	30/1/20 (60)			
5	Sara Daud	P	X IBB	98	21/10/19 (30)	5/11/19 (58)	1/2/20 (73)		
6	Selfi Patinggi	P	X IBB	55	30/1/20				
7	Srirahayu Kombong	P	X IBB	43					
8	Veronika Rini Pala'ngan	P	X IBB	40	18/10/19 (30)				
9	Yusprii Panusu	P	X IBB	35					
10	Yustina Laapadang	P	X IBB	30	19/11/19 (30)				
11	Muhammad Fitra A.	L	X IBB	43	7/2/20(43)				
12	Aljenti Enos Sapu	P	X MIA 1	31	29/1/20 (31)				
13	Bernardo Julians Saputra	L	X MIA 1	30	19/2/20 (30)				
14	Clodia Yuspita Tuna	P	X MIA 1	30	5/2/20 (30)				
15	Fabian O. Ambasalu	L	X MIA 1	54	19/10/19 (33)				
16	Haniel S. Kuranden	L	X MIA 1	40	5/2/20 (30)				
17	Imawati I. Palandi	P	X MIA 1	33	19/2/20 (33)				
18	Leonaedo	L	X MIA 1	51	22/2/20 (51)				
19	Livya Destiny Putri	P	X MIA 1	35	28/1/20 (35)				
20	Quin Tamariska S. K.	P	X MIA 1	33	20/2/20 (33)				
21	Crssilya Mambela	P	X MIA 3	30	28/1/20 (30)				
22	Glori Datu Andi Lolo	P	X MIA 3	40	28/1/20 (35)				
23	Lusiana Vero	P	X MIA 3	30					
24	Oktavio M. Maraya	L	X MIA 3	35	27/1/20 (35)				
25	Rizka Putri Palallo	P	X MIA 3	40	28/1/20 (35)				
26	Welly Tangdilintin M.	L	X MIA 3	38	28/1/20 (35)				
27	Yobel Capricorn T	L	X MIA 3	88	9/10/19 (33)				
28	Yosua G. Somalnggi	L	X MIA 3	45	28/1/20 (45)				
29	Alfortius H. Palimbong	L	X MIA 4	51	21/1/20 (36)				
30	Blacius A. Tangibali	L	X MIA 4	62	21/1/20 (52)				
31	Dony Tangke Allo	L	X MIA 4	64	24/1/20 (54)				
32	Fatrizah Rahmadani P.	P	X MIA 4	35	20/2/20 (30)				
33	Kevin Paskalis Putra C	L	X MIA 4	40	5/2/20 (35)				
34	Seftianus Redi	L	X MIA 4	38					
35	Syarina	P	X MIA 4	35	6/2/20 (40)				
36	Adila Adzrock Sulaiman	P	X IIS 1	70	13/2/20 (70)				
37	Adinda Delia	P	X IIS 1	46	14/2/20 (46)				
38	Alya Rusadi	P	X IIS 1	68	17/1/20 (58)				
39	Amelia Halim	P	X IIS 1	40					
40	Cristina Bella V.M	P	X IIS 1	43	14/2/20 (35)				
41	Daveran Ranggo	L	X IIS 1	48					
42	Dhea Ananda Mangin	P	X IIS 1	60	16/1/20 (60)				
43	Irasti Oktaviolet Valin	P	X IIS 1	38	13/2/20 (38)				
44	Jecklin Aulia	P	X IIS 1	75					
45	Rasiska S. Dzakira M.	P	X IIS 1	55					
46	Rendi	L	X IIS 1	62					
47	Yeri Barung	L	X IIS 1	33					
48	Ermia Pakulla	P	X IIS 2	50	21/1/20 (50)				
49	Febriana Gisela Maria	P	X IIS 2	50					
50	Febrianti Dita	P	X IIS 2	33					
51	Gregorius Devidsto	L	X IIS 2	48	10/10/2019 (35)				
52	Joice Febrianti Sumbung	P	X IIS 2	35	5/2/20 (30)				
53	Nadine Datu Gayang	P	X IIS 2	30	6/2/20 (30)				
54	Rianti Inri Tiakka	P	X IIS 2	38	5/2/20 (38)				
55	Astri	P	X IIS 3	48	5/2/20 (43)				
56	Eunuke Putisia Pembonan	P	X IIS 3	41					
57	Eyrene	P	X IIS 3	48	6/2/20 (48)				
58	Frentika F. Pakast	P	X IIS 3	35					
59	Hiskia Josua Geovani	L	X IIS 3	63	14/10/19 (30)				
60	Immanuel Owen	L	X IIS 3	71	20/11/19 (44)				
61	Michael Noventri	P	X IIS 3	36	18/1/2019				
62	Pipin	P	X IIS 3	55	21/1/20 (35)				
63	Rizky Saputra Palallo	L	X IIS 3	55	30/10/19 (40)				
64	Surya Pabalik	L	X IIS 3	48					
65	Untung Saputra	L	X IIS 3	35	18/2/20 (35)				
66	Valentino Adi Pratama	L	X IIS 3	38	4/2/20 (33)				
67	Weny Kurniadi Timbang	L	X IIS 3	50	21/1/20 (50)				
68	Winda Kiding Allo	P	X IIS 3	34					

Makale, 02 Maret 2020
Mengetahui
Kepala Sekolah,

S

DRS. MARTHEN L. PIRI, M.Pd
NIP. 19691027 199512 1 003


Hari, Tanggal : Senin, 02 Maret 2020

Daftar siswa yang sudah dan belum mendapat pembinaan sehubungan poin pelanggaran

Kelas XI Semester Ganjil Dan Genap Tahun Pelajaran 2019/2020

No.U rt	Nama Siswa	L/P	Kelas	Poin	Tanggal Konfirmasi Orang Tua				
					1	2	3	4	5
1	Bubumal Rombungin L.	L	XI BHS	30					
2	Fransiska Mangasik	P	XI BHS	60	21/12/19(30)	10/1/20(60)			
3	Eric Cherson Tangkelayuk	L	XI BHS	75		12/11/19(65)			
4	Raja	L	XI BHS	50	12/2/20(50)				
5	Resi Yanti Sanglamba'	P	XI BHS	40	21/12/19(35)				
6	Yosef Noel	L	XI BHS	70	13/8/19(60)	21/12/19(70)			
7	Pipe Novaldo Abeng	L	XI BHS	35					
8	Edgar Matoto	L	XI IPA-1	35					
9	Herianto Karoma'	L	XI IPA-1	35					
10	Hiskia Toding Tandilok	L	XI IPA-1	70	21/12/19(45)				
11	Isak Dualembang	L	XI IPA-1	45	28/11/19(40)				
12	Jemly Mangeka Palimbunga	P	XI IPA-1	40	21/12/19(30)				
13	Gratiantri Plena Serang	P	XI IPA-1	30					
14	Yolanda Gloryani Surya	P	XI IPA-1	30					
15	Andi Pratama	L	XI IPA-2	35	12/2/20(35)				
16	Anugrah Desvalry Sattu Paki	L	XI IPA-2	34					
17	Gloria Saisabella Andilolo	P	XI IPA-2	40	28/11/19(30)				
18	Jansen Febriyantoh Sanda	L	XI IPA-2	35	17/2/20(30)				
19	Monica Putri Toding	P	XI IPA-2	53	21/12/19(25)	15/2/20(45)			
20	Pemyatri Sesilia	P	XI IPA-2	40	17/2/20(35)				
21	Vanessa Gabriell Untung	P	XI IPA-2	40	30/11/19(30)				
22	Venofa Lisma	P	XI IPA-2	55	28/11/19(30)	21/12/19(50)			
23	Chevin Febrianto	L	XI IPA-3	31					
24	Srikandi Pesona	P	XI IPA-3	35	29/1/20(35)				
25	Dian Asvira Sambara'	P	XI IPA-4	30					
26	Meyfadhiza Alyah Arianto	P	XI IPA-4	46	24/1/20(38)				
27	Putri Nurafani	P	XI IPA-4	33	22/2/20(33)				
28	Sabrina Rahmadani Sabarud	P	XI IPA-4	36	25/2/20(36)				
29	Skolastika Resty Salempang	P	XI IPA-4	43	21/12/19(35)				
30	Yosefi Moscati P.	P	XI IPA-4	45	23/1/20(35)				
31	Alpin	L	XI IPS-1	70	16/8/19(30)	23/1/20(60)			
32	Arsyid Munandar Burhanudd	L	XI IPS-1	45	3/2/20(40)				
33	Chintya	P	XI IPS-1	30					
34	Dhea Garcia Alexander	P	XI IPS-1	40	31/1/20(30)				
35	Emayanti Amelia	P	XI IPS-1	58	1/2/20(53)				
36	Faelgaiskha Gepryel Kala'	P	XI IPS-1	40					
37	Mario Alfrado	P	XI IPS-1	43	5/2/20(33)				
38	Michael Josh Gerardy	P	XI IPS-1	30					
39	Sariastuti Sebo'	P	XI IPS-1	50		Pindah			
40	Stevani Runga' Andi Lolo	P	XI IPS-1	35					
41	Wahyudi Febriansyah	L	XI IPS-1	80	22/8/19(35)	19/11/19(70)	21/12/19(100-20=80)		
42	Wulantari Berlian Aris Zainud	P	XI IPS-1	61	7/2/20(56)				
43	Yelfiana Astrid P	P	XI IPS-1	33					
44	Arika Sepriani	P	XI IPS-2	30					
45	Ayu Brenda	P	XI IPS-2	69	31/10/19(36)	18/2/20(69)			
46	Daniel	P	XI IPS-2	50					
47	Erin Putri Sosang	P	XI IPS-2	40	21/12/19(30)				
48	Erma Kabangga'	P	XI IPS-2	30					

Lampiran 5. Persuratan


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
 Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222
 Laman: www.ap.fip.unm.ac.id; E-mail: apfipunm@unm.ac.id

Nomor : 070/UN36.4.3/KM/2020
 Lamp : -
 Perihal : **Permohonan Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth : Dekan FIP UNM
 Up. Pembantu Dekan Bidang Akademik

 Makassar

Dalam rangka memperlancar penyusunan skripsi mahasiswa, maka diperlukan dosen pembimbing yang mendampingi dan mengarahkan terutama dalam menyusun aspek permasalahan dan metodologinya.


Untuk itu kiranya berkenan memberikan tugas kepada:


1. Dr. Andi Nurochmah, M.Pd
2. Andi Wahed, S.Pd, M.Pd

Untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Aditya Kristian
 NIM : 174 304 1009
 Jurusan : Administrasi Pendidikan
 Judul Skripsi : Inovasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SD Negeri 6 Sanggalangi

Demikian penunjukan ini dan atas perkenaannya disampaikan ucapan terima kasih.

Makassar, 16 Maret 2020
 Ketua Jurusan,

Dr. Ed. Faridah, ST. M.Sc.
 NIP. 19740224 200501 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222
Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457

Laman: <http://fip.unm.ac.id>; E-mail: fip@unm.ac.id

Nomor : 1478/UN36.4/LT/2020 11 Maret 2020
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi
Yth : 1. **Dr. Andi Nurochmah, M.Pd**
2. **Andi Wahed, S.Pd., M.Pd**

Berdasarkan surat usulan Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan, Nomor : 067/UN36.4.3/KM/2020, tanggal 11 Maret 2020, tentang pembimbingan penulisan skripsi mahasiswa Program Sarjana (S1), kami menugaskan Bapak/ Ibu untuk membimbing mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a	N I M	Jur/ Prodi	Judul Skripsi
Aditya Kristian	1743041009	Administrasi Pendidikan	<i>INOVASI KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN DI SD NEGERI 6 SANGGALANGI</i>

Harapan kami semoga pembimbingan ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai pada waktu yang telah ditentukan.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Mustafa, M.Si

NIP 196605251992031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
 JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
 Alamat: JL. Tamalate I Kampus Tidung UNM
 Telepon: (0411)884457-883076 fax (0411)883076
 Laman : <http://www.unm.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal penelitian dengan judul **"Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa SMA Negeri 5 Di Kabupaten Tana Toraja"**

Nama : Aditya Kristian
 NIM : 1743041009
 Jurusan : Administrasi Pendidikan
 Fakultas : Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti, naskah skripsi penelitian ini telah memenuhi syarat untuk diseminarkan.

Makassar, 16 April 2021

Pembimbing I;

Pembimbing II;

Dr. Andi Nurochmah, M.Pd
 NIP. 19580518 198503 2 001

Andi Wahed, S.Pd, M.Pd
 NIP. 19870310 201504 1 003

Disahkan:

Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan

Dr. Ed. Faridah, S.T. M.Sc
 NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
 JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
 Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222
 Laman: www.ap.fip.unm.ac.id; E-mail: apfipunm@unm.ac.id

Nomor : 020/Pan-Seminar/2021 29 April 2021
 Lamp. : 2 Eks.
 Hal : Undangan Seminar Proposal Penelitian

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu

Dr. Wahira, M.Pd
 Dr. Andi Nurochmah, M.Pd
 Andi Wahed, S.Pd, M.Pd
 Dr. Ardiansyah, S.IP, M.Pd
 Syamsurijal Basri, S.Pd, M.Pd

Pimpinan
Pembimbing I
Pembimbing II
Penanggap I
Penanggap II

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk bertindak sebagai Pembimbing/Penanggap pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian mahasiswa Jurusan Administrasi Pendidikan;

Nama : Aditya Kristian
NIM : 1743041009

Insha Allah dilaksanakan pada:
 Hari/Tanggal : Jumat/28 Mei 2021
 Pukul : 13.30 – 15.00 Wita
 Tempat : *Virtual Meeting-Zoom Cloud Meeting*

Atas kerja sama dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Mengetahui:
 Ketua Jurusan,

Dr. Ed. Faridah, ST. M.Sc.
 NIP. 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222
Laman: www.ap.fip.unm.ac.id; E-mail: apfipunm@unm.ac.id

PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pembahas utama dan para peserta seminar yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2021, maka usulan penelitian untuk skripsi saudara(i) di bawah ini:

Nama : Aditya Kristian
NIM : 1743041009
Program Studi/Jurusan : Administrasi Pendidikan
Judul : Penerapan Sistem Poin Pelanggaran Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa SMA Negeri 5 di Kabupaten Tana Toraja

Telah dilakukan perbaikan/penyempurnaan sesuai usulan/saran pembahas utama dan peserta seminar, maka usulan penelitian untuk skripsi saudara diperkenankan meneruskan kegiatan pada tahap selanjutnya.

Makassar, 23 September 2021

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Dr. Andi Nurochmah, M.Pd
NIP. 19580518 198503 2 001

Pembimbing II

Andi Wahed, S.Pd, M.Pd
NIP. 19870310 201504 1 003

Disahkan:

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Mustafa, M.Si
NIP: 19660525 199203 1 002



Ketua Jurusan AP FIP UNM

Dr. Ed. Faridal, ST., M.Sc
NIP: 19740224 200501 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar KP. 90222

Telepon: 884457, Fax. (0411) 884457

Laman: <http://fip.unm.ac.id>; E-mail: fip@unm.ac.id

Nomor : 5905/UN36.4/LT/2021 04 Oktober 2021

Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian

Yth : **Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan**
Cq. Kepala UPT P2T BKPM Pro. Sulawesi Selatan

Di –
Makassar

Sehubungan dengan penyelesaian studi mahasiswa Program Strata Satu (S-1), maka terlebih dahulu harus melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi. Untuk itu kami mohon kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : **Aditya Kristian**
NIM : 1743041009
Jurusan/ Prodi : Administrasi Pendidikan
Judul Skripsi : **Penerapan Sistem Poin Pelanggaran dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa SMA Negeri 5 di Kabupaten Tana Toraja**

Diberikan izin untuk melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang ada dalam wilayah Lembaga/ Instansi/ Organisasi yang Bapak/ Ibu Pimpin.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Mustafa, M.Si

NIP 196605251992031002

Tembusan:

1. Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA**

IZIN PENELITIAN
Nomor: 221/X/IP/DPMPTSP/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : ADITYA KRISTIAN
 Nomor Pokok : 1743041009
 Tempat/Tgl.Lahir : Limbu / 19 April 1998
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Lemo
 Tempat Meneliti : SMAN 5 TANA TORAJA

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“PENERAPAN SISTEM POIN PELANGGARAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA SMA NEGERI 5 DI KABUPATEN TANA TORAJA”

Lamanya Penelitian : 13 Oktober 2021 s/d 13 Desember 2021



Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 13 Oktober 2021
 a.n. Bupati Tana Toraja
 Kepala Dinas,

YURINUS TANGKELANGI, SH., MH.
 NIP.19650211 199610 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21895/S.01/PTSP/2021
 Lampiran :
 Perihal : **izin Penelitian**

KepadaYth.
 Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar Nomor : 5905/UN36.4/LT/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ADITYA KRISTIAN**
 Nomor Pokok : 1743041009
 Program Studi : Adm. Pendidikan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. Tamalate I Tidung, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENERAPAN SISTEM POIN PELANGGARAN DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA SMA NEGERI 5 DI KABUPATEN TANA TORAJA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Oktober s/d 11 Desember 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada tanggal : 06 Oktober 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19620624 199303 1 003

Tembusan Yth
 1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

RIWAYAT HIDUP



Aditya Kristian, lahir pada tanggal 19 April 1998 di Limbu, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja. Aditya Kristian adalah anak ke lima dari lima bersaudara, Putra dari pasangan Bapak Muhammad Ali dan Ibu Yuldiana Rantetasik. Pendidikan yang pernah ditempuh yakni di SD Negeri 108 Rantelemo pada tahun 2005-2011 kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Makale pada tahun 2011-2014. Pada tahun yang sama, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Makale, dan tamat pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri yakni Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan.